

Edisi 1, Juni 2018

WARTABALITBANG

FAKTUAL, RESPONSIF, FUTURISTIK



INOVASI PEMBELAJARAN



ASIAN GAMES
2018 | Jakarta
Palembang

DAFTAR ISI

02 DARI REDAKSI

03-05 HIDUPKAN INOVASI
PEMBELAJARAN DI KELAS

06-07 PELIBATAN MASYARAKAT DAN
KESETARAAN GENDER DI DOMPU

08 TAMPILAN BARU LAMAN
BALITBANG MUDAHKAN
MASYARAKAT MENGAkses ARTIKEL
ILMIAH

09 KERJA SAMA PEMERINTAH
INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN
LITERASI DAN NUMERASI ANAK
INDONESIA

10 MENINGKATKAN INTEGRITAS
UJIAN MELALUI UNBK

11 SINDO JOURNALISM CLASS 2018:
UPAYA MENINGKATKAN INTUISI DAN
INISIATIF INSAN MEDIA

12 RAT KOPERASI PEGAWAI
BALITBANG KEMENDIKBUD:
CERMINAN BERDEMOKRASI DAN
KETERBUKAAN MANAJEMEN

13-14 PEMBINAAN PEGAWAI
SEKETARIAT BALITBANG TAHUN 2018

15-16 MUSEUM DI INDONESIA SEPI
PENGUNJUNG?

17-18 UJIAN NASIONAL SMP: UNBK
NYAMAN DAN PRAKTIS

19-20 MEMBANGUN NASIONALISME
MASYARAKAT DI KABUPATEN
NATUNA

21-23 KREATIVITAS DAN INOVASI
PENDIDIK DALAM PENGEMBANGAN
MODEL PEMBELAJARAN

24-25 BUKU TEKS PELAJARAN MASA
DEPAN

26-27 MENJAWAB TANTANGAN
KECAKAPAN ABAD 21: MENGUJI HAL
YANG LEBIH DARI PENGETAHUAN
RUTIN

28-29 INTEGRITAS UJIAN
MERAMBAH SAMPAI KE LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

30-31 STUDI UTAMA *PROGRAMME
FOR INTERNATIONAL STUDENTS
ASSESSMENT (PISA) 2018* DI
INDONESIA: LEBIH DARI SEKEDAR
MELAKUKAN TES

32 PENINGKATAN DAYA SAING
ORGANISASI MELALUI PERAN
PENELITI, JURNAL ILMIAH, DAN
KONFERENSI

33-34 PENELITIAN DIASPORA
PENUTUR AUSTRONESIA DI
NUSANTARA & AWAL PENGARUH
HINDU-BUDDHA DI PANTAI UTARA
JAWA TENGAH

35-37 PENGOLAHAN DATA DAN
ANALISIS ARTEFAK

38-39 AKREDITASI: DARI
COMPLIANCE KE *PERFORMANCE*

40-42 UJIAN NASIONAL TAHUN 2018

43 PRAKTIK BAIK INOVASI: BERMAIN
PERAN DI HALAMAN SEKOLAH
UNTUK MEMAHAMI BACAAN

44 PRAKTIK BAIK INOVASI: MEDIA
PEPERANGAN BELA LAUT INDONESIA

45 ARTIKEL ILMIAH

46 RESENSI BUKU: MANIK-MANIK
MEMESONA DARI DULU HINGGA
SEKARANG

47-48 TANTANGAN DUNIA
PENELITIAN INDONESIA

49-50 SETENGAH DARI PERSOALAN
LITERASI KITA ADA DI SEKOLAH

51 GALERI FOTO: PELAKSANAAN UN
DAN USBN 2018

51 GALERI FOTO: GEBYAR
HARDIKNAS 2018

52 GALERI FOTO: DISKUSI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN INDONESIA

52 GALERI FOTO: KEGIATAN PISA
2018

DARI REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Warta Balitbang (WB) kembali hadir pada Edisi Pertama di tahun 2018 dengan semangat baru untuk melakukan perbaikan materi dan penampilan yang lebih menarik.

Pada edisi kali ini Redaksi telah menyiapkan beragam artikel yang telah dikemas untuk menambah informasi dan wawasan para pembaca yang budiman.

Topik utama secara khusus tentang “Inovasi Pembelajaran”. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, yang mengusung tema “Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan”, Balitbang Kemendikbud bekerja sama dengan Program INOVASI (Kerja sama Pemerintah Indonesia – Australia) menyelenggarakan Seminar “**Hidupkan Inovasi Pembelajaran di Kelas**”, serta menampilkan sosok Roslinda yang mengingatkan kita kepada sosok pejuang perempuan “RA Kartini”.

Selain topik utama tersebut, kami juga menyampaikan informasi seputar tampilan baru laman Balitbang, Ujian Nasional, Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Balitbang, Pembinaan Pegawai Sekretariat Balitbang, Pengembangan Model Inovasi Pembelajaran, Buku Teks Pelajaran Masa Depan, Menjawab Tantangan Kecakapan Abad 21: Menguji Hal yang Lebih dari Pengetahuan Rutin, Studi Utama *Programme for International Students Assessment (PISA) 2018*, Peningkatan Daya Saing Organisasi melalui Peran Peneliti, Jurnal Ilmiah dan Konferensi, Akreditasi: Dari *Compliance* ke Performa, serta Praktik Baik INOVASI.

Sajian berupa nilai budaya kami ungkap melalui artikel tentang Pencerminkan Kearifan Lokal Masyarakat Bugis, Situs Kampung Tua Kao, Museum Indonesia Sepi Pengunjung?, Penutur Austronesia di Nusantara, Awal Pengaruh Hindu-Buddha di Pantai Utara Jawa Tengah, serta Pengolahan Data dan Analisa Artefak.

Opini-opini yang membangun penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan juga kami sajikan. Dan tulisan ilmiah yang terdapat pada Jurnal Kapata, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, dan Jurnal Amerta sebagai referensi. Pembaca dapat langsung memindai kode yang ada pada artikel tersebut untuk menelusuri secara daring. Resensi Buku “Manik-manik Menembus Zaman” untuk menambah koleksi bacaan para pembaca budiman.

Semoga sajian pada edisi kali ini dapat menambah referensi untuk kegemaran membaca/literasi, dan meningkatkan semangat kami untuk senantiasa berkreasi menyajikan berita dan artikel yang lebih baik lagi.

Selamat Membaca, Salam

Redaksi

PEMBINA

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

PENGARAH

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan

Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama

PIMPINAN REDAKSI/ANGGOTA REDAKTUR

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Publikasi

REDAKTUR

Genardi Atmadireja

Suprananto

Nur Hasan Hamka

Dian Rahayu

Nurul Najmah

Wicka Yunita Dwi Utama

Dinan Hasbudin Apip

Badriyatu Sholihah

Amaliah Fitriah

PENYUNTING/EDITOR

Diyana Nur Rakhmah

Zulfikri Anas

Eviana Hikamudin

Libra Hari Inagurasi

DESAIN GRAFIS

Ratih Larasati

Fahmi

FOTOGRAFER

Heru Setyono

Ibar warsita

SEKRETARIAT

Rohani Panjaitan

Wina Handayani

Mufiarni

ALAMAT SEKRETARIAT REDAKSI:

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama,
Balitbang Kemendikbud. Gedung E Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Surel: kerjasama.balitbang@kemdikbud.go.id

HIDUPKAN INOVASI PEMBELAJARAN DI KELAS

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini mengusung tema “Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan”. Dalam pidatonya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pentingnya penguatan pendidikan dan pemajuan kebudayaan yang juga merupakan respon terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi. Tentunya, membangun dan memperkuat infrastruktur harus pula disertai dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sungguh-sungguh - dan guru mempunyai andil besar dalam keberhasilan pendidikan nasional, yakni untuk mencetak pribadi-pribadi yang berkualitas.

Kondisi Indonesia yang sangat heterogen tentunya memiliki tantangan pendidikan yang berbeda-beda di setiap daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun terus memberikan dukungan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai pelaksana urusan pemerintah di dalam bidang pendidikan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah, sejak awal tahun 2016 pemerintah pun menjalin kemitraan dengan pemerintah Australia yang terwujud dalam bentuk program kemitraan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, program INOVASI fokus pada peningkatan hasil belajar siswa. Berbagai upaya dilakukan INOVASI untuk memahami cara-cara yang terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Apalagi mengingat pentingnya keterampilan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai keterampilan dasar yang harus dikuasai anak-anak usia sekolah dasar. Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan, “Tuntutan saat ini bukan seberapa banyak siswa yang belajar, tetapi seberapa kompeten mereka agar mampu berperan penting dan unggul dalam pergaulan global.”

Dalam 15 tahun terakhir ini, Indonesia telah banyak mengalami kemajuan dalam hal akses ke pendidikan dasar. Pengeluaran pemerintah telah meningkat dua kali lipat dan pendaftaran siswa di jenjang sekolah dasar hampir mencapai 100%. Namun, meski kini ada lebih banyak anak yang bersekolah, hal ini belum menuangkan hasil belajar siswa yang lebih baik. Berbagai tes yang menguji pengetahuan dan keterampilan

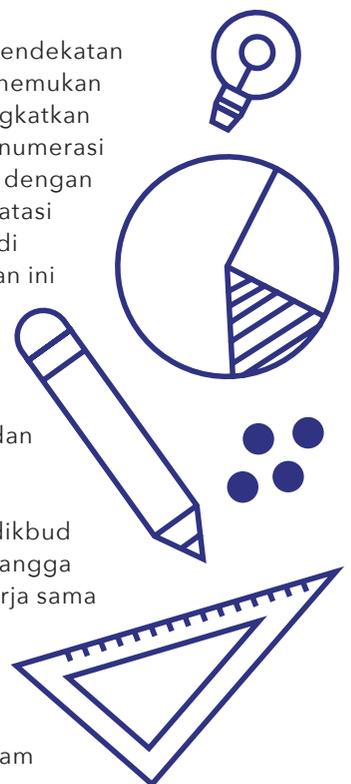
siswa dalam hal literasi dan numerasi dasar menunjukkan kinerja siswa Indonesia yang masih belum mampu menandingi rekan-rekan sebaya mereka di negara tetangga.

INOVASI UNTUK HASIL BELAJAR YANG LEBIH BAIK

Tantangan terbesar yang dihadapi semua guru adalah menarik perhatian siswa dalam belajar, dan membuat mereka memahami pelajaran yang diberikan bahkan setelah siswa meninggalkan kelas. Agar hal ini terjadi, pengalaman belajar di kelas membutuhkan ide-ide inovatif guru agar mampu membuat metode pengajaran lebih efektif.

INOVASI menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk menemukan cara terbaik dalam meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi siswa - solusi yang sesuai dengan potensi lokal untuk mengatasi tantangan pembelajaran di daerah. Program kemitraan ini diimplementasikan di 12 kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan juga Jawa Timur.

Kepala Balitbang Kemendikbud pun mengapresiasi dan bangga dengan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah mitra program yang sangat berkomitmen untuk melakukan perubahan. “Aplikasi nyata dari program



INOVASI ini akan tampak dalam proses belajar mengajar di kelas, bukan dalam bentuk mendikte, namun lebih dengan menggali potensi lokal sehingga dapat memberi arah pola pengajaran bagi anak," ujarnya.

"Melalui sejumlah studi dan program rintisan INOVASI, kita sudah mendapatkan beberapa bukti bahwa inovasi itu mudah dan juga tak harus di kota. Bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Kondisi yang sederhana pun dapat dilaksanakan. Sesederhana apapun sekolah itu bisa melakukan inovasi," jelas Kepala Balitbang Kemendikbud.

BATU KERIKIL UNTUK BELAJAR MATEMATIKA, Kabupaten Bima, NTB

Ibu Guru Yuyu tidak mengajar di kota besar, melainkan di desa. Ia harus menempuh jarak sejauh 60KM untuk mencapai kabupaten Bima. Terlepas dari jauhnya jarak tempuh, ia tetap semangat menciptakan sebuah inovasi untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Menurutnya, mengajar anak-anak kelas awal itu penuh dinamika, tapi itulah menariknya. "Dengan karakter mereka yang beragam, saya jadi merasa memiliki kewajiban untuk memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda, sesuai dengan karakter dan kondisi masing-masing siswa. Karena itulah, saya selalu mencoba menggunakan metode yang berbeda setiap harinya. Saya juga selalu menggunakan permainan untuk diselipkan di materi pelajaran. Saya percaya, asal konsep yang kita terapkan benar, mereka pasti akan mengerti," ceritanya.

Siswa di kelasnya kerap kali diajak untuk melakukan pengamatan maupun mencoba bermacam alat peraga yang ada di kelas. Tujuannya, agar mereka lebih mudah menangkap dan memahami konsep-konsep yang ia ajarkan. Salah satunya adalah permainan kerikil yang ia terapkan untuk materi perkalian dalam pembelajaran matematika di kelas 2.

"Sejauh ini, cara tersebut termasuk efektif. Bahkan, setelah bermain kerikil itu, mereka bisa menulis perkalian 1 sampai 10 dengan sendirinya, tanpa saya kasih tahu karena rupanya mereka sudah paham konsepnya. Mereka terus mencoba sendiri sampai ada satu anak datang ke saya, memberi tahu kalau dia sudah hapal. Sebagai apresiasi, saya lalu meminta dia menghapalkan di depan kelas, di depan teman-temannya. Cara ini membuat teman-temannya yang lain termotivasi untuk melakukan

hal yang sama," ungkapnya penuh haru. Hal ini, diakui Yuyu, cukup melegakan hatinya apalagi ia bertekad mengubah *mindset* anak didiknya yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang menakutkan menjadi pelajaran yang menyenangkan.

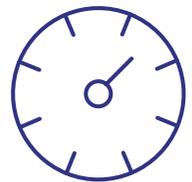
PERTAMA DI INDONESIA: BULUNGAN GUNAKAN BOSDA UNTUK SUPLAJ BUKU BACAAN DI SEKOLAH, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Di Bulungan, pertumbuhan minat membaca yang kuat di Kalimantan Utara, dan juga di banyak wilayah di Indonesia, tetap merupakan pekerjaan yang sedang berjalan. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang dilakukan oleh Kemendikbud RI menunjukkan nilai rata-rata literasi membaca untuk Kalimantan Utara adalah dua poin di bawah rata-rata nasional*. Dengan angka tersebut, Kaltara terus mendorong Gerakan Literasi Nasional (GLS) khususnya di kabupaten Bulungan.

Sebagai kabupaten mitra, INOVASI telah bekerja dengan kabupaten Bulungan sejak tahun 2017 akhir untuk mendukung tumbuhnya gerakan literasi. Bekerja sama dengan guru dan pemangku kepentingan di pemerintah lokal, kegiatan program termasuk lokakarya Gerakan Literasi Sekolah telah dilakukan di Peso, Bulungan.

Seiring dengan perkembangan kegiatan, dukungan kabupaten Bulungan untuk membangun minat membaca pun semakin tinggi. Baru-baru ini, kabupaten ini menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mendanai buku bacaan untuk anak-anak dengan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Alokasi pendanaan telah dimasukkan dalam perencanaan dana kabupaten Bulungan.

Setiap sekolah diharuskan menyajikan buku-buku seperti novel, buku cerita, komik, sejarah, sastra dan pengetahuan umum. Sekolah wajib membelanjakan anggaran BOSDA untuk menyediakan paling sedikit lima buku baru dengan lima judul berbeda setiap tahun. Ketersediaan buku-buku itu diharapkan menumbuhkan budaya baca kepada 24.094 siswa Bulungan yang



tersebar di 778 SD dan 245 SMP. "Ini merupakan respon kami untuk menjalankan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)," jelas Suparmin Seto, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulungan.

*Sumber: Studi RPSA INOVASI di Kalimantan Utara, 2017

KEPEMIMPINAN INOVATIF KEPALA SEKOLAH, Kota Batu, Jawa Timur

Di Jawa Timur, INOVASI mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada semester pertama tahun 2017, INOVASI melakukan studi pemetaan tentang keberlanjutan inovasi pendidikan atau praktik menjanjikan yang ada di provinsi tersebut. Hal ini menjadi salah satu upaya membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendokumentasikan berbagai praktik inovasi pendidikan dasar yang terbukti baik, serta memahami dalam konteks apa inovasi tersebut bisa berhasil dan berkelanjutan. Ini salah satunya.

Sri Winarni adalah kepala SDN Sumbergondo 2, yang terletak di ujung timur-utara Kota Batu, dekat kaki gunung Arjuna di Jawa Timur. Beliau mulai memimpin sekolah ini sejak 14 September 2014. Sebelumnya, Ibu Sri Winarni telah mengabdikan sebagai guru olah raga di Kota Batu selama 29 tahun. Saat mulai menjabat, Sri

Winarni menghadapi tantangan yang cukup berat. Guru-guru kurang disiplin. Kegiatan pembelajaran yang lebih banyak ceramah, menulis ulang dari papan tulis, dan tidak mengaktifkan murid. Bangunan fisik sekolah banyak yang rusak dan sarana pembelajaran lain sangat minim. Nilai rata-rata UASBN murid pun sangat rendah, yakni peringkat 15 di tingkat kecamatan. Selain itu, peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah juga sangat rendah.

Menghadapi berbagai tantangan di atas, sang kepala sekolah pun memulai perubahan dengan membenahi kualitas sumber daya manusia di sekolahnya. Hasilnya, pada tahun 2016, SDN Sumbergondo 2 ditetapkan sebagai sekolah rujukan se-Kota Batu, dan bahkan di tingkat provinsi. Dalam waktu ±3 tahun, sang kepala sekolah berhasil mentransformasikan sekolahnya, dari sekolah pinggiran yang terbelakang menjadi sekolah rujukan yang penuh prestasi.



UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI:

Okky Adrian

Sub Bagian Kerja Sama dan Publikasi
Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
oky.adrian@kemdikbud.go.id

Annisaa Rachmawati

Communications Specialist
INOVASI
annisaa.rachmawati@thepalladiumgroup.com
+62 811 8855 184

Kunjungi <http://litbang.kemdikbud.go.id> untuk informasi lebih lanjut, ataupun artikel ilmiah dan layanan Balitbang lainnya.

Ingin tahu lebih banyak tentang apa dan bagaimana INOVASI bekerja?

Kunjungi website www.inovasi.or.id dan laman Facebook <https://id-id.facebook.com/InovasiPendidikanAIP/> untuk informasi lebih lanjut.

PELIBATAN MASYARAKAT DAN KESETARAAN GENDER DI DOMPU

Penulis: Tim INOVASI

Sosok Roslinda mengingatkan kita kepada sosok pejuang perempuan, RA Kartini. Sejak tahun 1985 hingga 2017, konsistensinya terbukti dalam mengabdikan dirinya sebagai guru di Dompu. Kini, Roslinda memangku tanggung jawab sebagai kepala sekolah di SDN 28 Dompu.

Kecintaannya pada bidang pendidikan tidak terbatas di sekolah saja. Roslinda pun aktif terlibat di program INOVASI, program kemitraan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di bidang literasi dan numerasi.

Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi mitra pertama dalam program INOVASI, dengan enam kabupaten mitra yaitu Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima. Dalam proses implementasinya, INOVASI menekankan pada solusi lokal untuk masalah lokal, di mana program rintisan yang dijalankan di setiap kabupaten mitra disesuaikan dengan tantangan lokal.

Di Dompu, program rintisan disebut Belajar di Sekolah dan Masyarakat (BERSAMA), sebuah Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan Melibatkan Komunitas Masyarakat. Pada program rintisan ini, unsur sekolah dan masyarakat didorong untuk menciptakan kolaborasi yang bersinergi guna mengembangkan pembelajaran literasi dan numerasi anak. Hal ini berangkat dari berbagai fenomena bahwa seringkali anak membolos sekolah karena kesibukan di tengah masyarakat. Misalnya, ketika musim panen datang, murid-murid mengesampingkan sekolah untuk membantu memanen. Hal ini cukup berpengaruh atau menentukan mutu pendidikan anak sekolah terutama tingkat sekolah dasar. Agar sekolah tetap jadi prioritas utama, perlu adanya dorongan dan pengertian lebih dari masyarakat.

Sebagai pejuang pendidikan, Roslinda pun menyambut positif program ini. Ibu dari 3 orang anak ini mengaku, keterlibatannya dalam program INOVASI sebagai Fasilitator Daerah (Fasda) Dompu



“INOVASI mengajak saya mengerti pendekatan PDIA untuk mencari cara yang cocok dalam menangani setiap masalah yang ada. Ini merupakan hal baru dan menarik untuk dipelajari demi mendorong kemajuan generasi bangsa.”

menambah modalnya dalam membimbing SDN 28 Dompu. Roslinda merupakan Fasda dalam bidang PDIA (*Problem Driven Iterative Approach*), pendekatan yang digunakan INOVASI untuk meramu solusi lokal bagi masalah lokal.

Sebagai Fasda, Roslinda berlatih bersama para guru dan pengawas dari sekolah di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, untuk menemukan cara, pendekatan, dan strategi pembelajaran literasi dan numerasi.

“INOVASI mengajak saya mengerti pendekatan PDIA untuk mencari cara yang cocok dalam menangani setiap masalah yang ada. Ini merupakan hal baru dan menarik untuk dipelajari demi mendorong kemajuan generasi bangsa,” kata Roslinda.

Tidak berhenti di situ saja, Roslinda pun membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada rekan guru dan pengawas lain di tempatnya mengabdikan, SDN 28 di Desa Katua. Kegiatan positifnya didukung penuh oleh sang almarhum suami sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Almarhum suami diakuinya turut mengerjakan tugas rumah tangga sebagai bentuk konkret dukungannya.

“Suami berpesan untuk supaya saya mendahulukan

tugas menjadi guru dan kepala sekolah, jangan mendahulukan tugas pribadi, karena tugas tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” jelasnya.

Menjalankan peran sebagai kepala sekolah diakui Roslinda bukan sekadar menjadi seorang pemimpin, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi para guru untuk dapat menjadi pemimpin yang bijak, yang tidak menuntut banyak.

“Saya juga selalu ingat pesan suami, untuk saya tidak hanya dapat menjadi contoh yang baik bagi para guru dan murid di sekolah, tapi menjadi contoh yang baik kepada anak-anak itu lah tetap yang terutama,” tambahnya.

KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Dalam rangka mengenang perjuangan Kartini yang peringatannya jatuh pada 21 April lalu, Roslinda berpesan bahwa perempuan merupakan patokan dalam mengembangkan potensi pendidikan yang berkarakter.

“Berkarakter dalam arti peduli, jujur, santun dan berjiwa gotong royong. Jangan sampai pekerjaan hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki seperti zaman dahulu. Perempuan juga harus ambil bagian dalam melaksanakan tugas mendorong pendidikan yang berkarakter,” ungkap Roslinda.

Roslinda menekankan bahwa perempuan harus berkompentensi, profesional, berintegritas, dan beramanah dalam melaksanakan tugasnya. Roslinda turut mendorong penerapan kesetaraan gender di sekolahnya. Sosok Roslinda sebagai kepala sekolah perempuan merupakan salah satu praktik kesetaraan gender yang nyata yang telah diterapkan di SDN 28 Dompu.

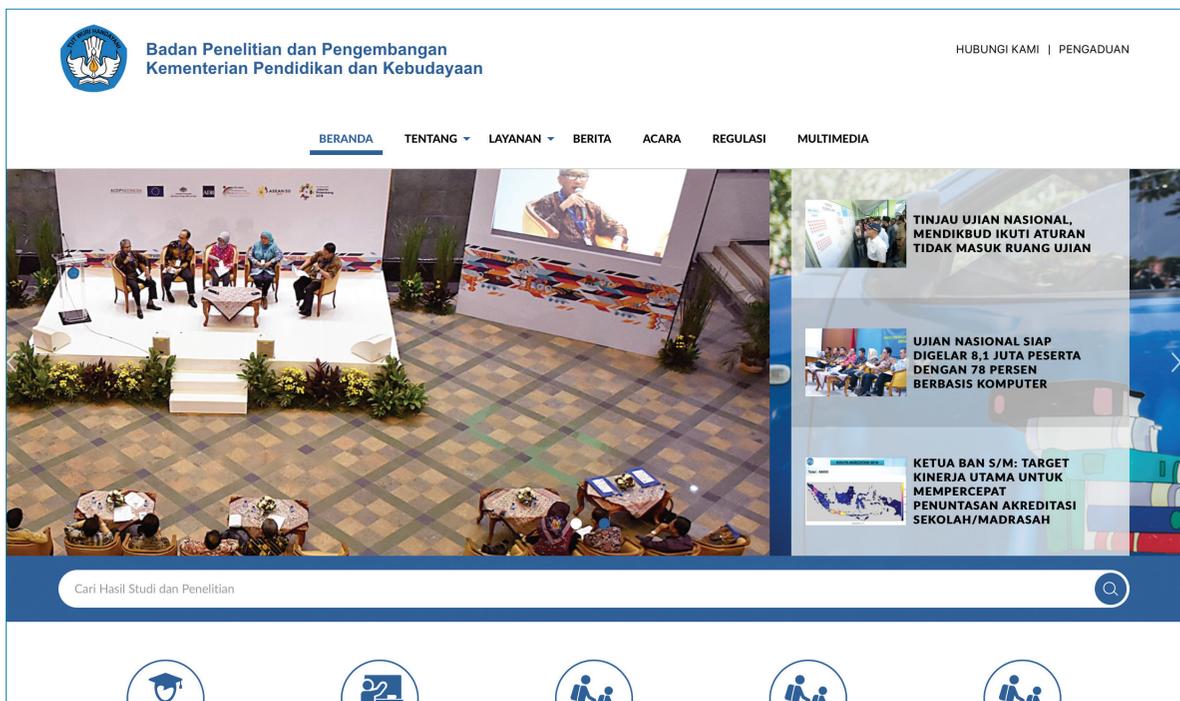
Walaupun Roslinda mengaku bahwa jumlah guru perempuan dan laki-laki belum berimbang, beliau selalu mendorong para guru untuk menyamaratakan peran siswa perempuan dan laki-laki dalam praktik pembelajaran di kelas.

“Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, para guru harus bisa membagi rata porsi murid laki-laki dan perempuan, misalnya dalam kelompok diskusi, jumlahnya harus berimbang dan masing-masing dari mereka harus diberi kesempatan berpendapat yang sama,” tegas Roslinda.

Roslinda berharap agar praktik-praktik pembelajaran di kelas dan di masyarakat harus mulai memperhatikan hal-hal kesetaraan gender.

TAMPILAN BARU LAMAN BALITBANG MUDAHKAN MASYARAKAT MENGAKSES ARTIKEL ILMIAH

Penulis: Oky Adrian/Anandes Langguana



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) meluncurkan wajah baru laman Balitbang. Dengan mengakses laman litbang.kemdikbud.go.id masyarakat akan lebih mudah mengakses artikel ilmiah dan layanan Balitbang yang lainnya.

“Akses terhadap artikel ilmiah dan layanan Balitbang lainnya menjadi semakin mudah melalui satu laman. Hal tersebut menjadi tujuan dari pengembangan laman Balitbang yang ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat”, ujar Kepala Balitbang, Totok Suprayitno di acara Seminar Internasional Pendidikan bertajuk *Fostering Young Creative Talents through Integrative Thinking* di Plaza Insan Berprestasi, Kemendikbud Jakarta, (18/12/2017).

Hal baru yang ditampilkan di laman tersebut adalah perwajahan laman, data statistik resmi, menu

layanan yang berisi layanan Balitbang, menu acara yang memudahkan masyarakat ikut serta di acara Balitbang, multimedia, dan uji publik.

Masyarakat juga diharapkan menjadi semakin mudah untuk mencari artikel ilmiah yang diterbitkan melalui jurnal-jurnal ataupun hasil kajian Balitbang Kemendikbud melalui “satu kotak pencarian” secara komprehensif. Masyarakat cukup memasukan “kata kunci” kemudian sistem yang akan mencari konten yang sesuai di basis data.

Khusus untuk video, Balitbang Kemendikbud juga bekerja sama dengan Program INOVASI untuk menampilkan praktik baik yang dijalankan oleh program tersebut.

“Kami juga mengapresiasi adik-adik prakerin dari SMK yang membantu membuat video animasi peluncuran laman ini”, Totok menambahkan.

INOVASI:

Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Australia dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Numerasi Anak Indonesia

Penulis: Amaliah Fitriah

Saat ini telah banyak kemajuan dalam akses pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan belanja untuk pendidikan dasar dua kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Demikian pula, tingkat pendaftaran siswa di sekolah dasar telah mencapai 100%. Namun demikian, akses yang lebih luas dalam pendidikan dasar, belum dengan sendirinya menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Berbagai tes yang dilakukan untuk menguji pengetahuan dan keterampilan siswa dalam literasi dan numerasi dasar menunjukkan bahwa siswa Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia dan Australia untuk menjalin kemitraan melalui program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) untuk menemukan cara-cara meningkatkan hasil pembelajaran siswa di sekolah dalam hal kemampuan literasi dan numerasi (calistung). Hingga saat ini, INOVASI telah bekerja sama dengan 12 kabupaten yang tersebar di empat provinsi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Diharapkan, pada akhir program ini pemerintah kabupaten dan juga provinsi telah mampu menerapkan dan menyebarkan pendekatan-pendekatan yang efektif dan relevan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Belajar dari pengalaman program-program sebelumnya yang menerapkan 'satu solusi untuk semua masalah', yang ternyata belum memberikan hasil yang berkelanjutan, maka INOVASI mencoba menggunakan pendekatan baru yang diberi nama *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA). Pendekatan ini berusaha untuk mempertimbangkan konteks multi-budaya di Indonesia. Pada dasarnya PDIA berusaha untuk mengembangkan berbagai program rintisan (pilot) untuk melihat apa yang terbukti berhasil dan tidak berhasil dalam meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi siswa. Untuk itu, INOVASI dan mitra-mitra di daerah mengeksplorasi dan mengidentifikasi tantangan-tantangan pembelajaran yang ditemui di daerah, untuk kemudian bersama-sama merancang solusi yang relevan dengan konteks daerah tersebut.

Fokus dari program INOVASI, dengan pendekatan PDIA-nya, adalah pada cara-cara meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar terutama di kelas-kelas awal. Hal ini

dilakukan melalui penguatan praktik pengajaran di ruang kelas, peningkatan kemampuan guru dalam pengajaran literasi dan numerasi, serta pertimbangan tentang potensi anak yang beragam dalam pembelajaran literasi dan numerasi.

Karena sifatnya yang khas, *problem driven*, adaptasi, dan mempertimbangkan konteks lokal, maka setiap daerah (kabupaten) yang bermitra dengan inovasi memiliki pendekatan yang berbeda-beda, namun tetap fokus pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Di Lombok Utara, Sumbawa Barat, program INOVASI difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran literasi di kelas awal. Berbeda dari Lombok Utara yang fokus pada peningkatan literasi dasar, maka Sumbawa lebih memberikan fokus pada pembelajaran numerasi dasar. Di Lombok Tengah, kondisi yang dihadapi berbeda dari daerah lain, yaitu banyaknya anak berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan dari pemerintah. Maka program INOVASI di Lombok Tengah ditargetkan untuk pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memastikan semua anak dapat mencapai potensi belajar mereka (pendidikan inklusi). Di Dompu, NTB, INOVASI fokus pada pelibatan masyarakat dalam meningkatkan hasil belajar literasi dan numerasi siswa. Sedangkan di Bima NTB, permasalahan utama literasi dan numerasi adalah pada Bahasa pengantar di sekolah yang masih dominan menggunakan bahasa ibu (bahasa daerah). Sehingga hal ini mempengaruhi hasil pencapaian belajar siswa. Untuk itu, INOVASI mencanangkan program bahasa Pengantar Pembelajaran untuk membantu siswa yang Bahasa pengantarnya bukan Bahasa Indonesia agar dapat meningkatkan hasil belajar mereka.

Dengan sifat program dan pendekatan yang digunakan ini, INOVASI diharapkan dapat secara langsung meningkatkan kapasitas daerah karena setiap tahapan program ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah baik itu pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat dan organisasi lokal. Demikian pula dengan perhatian pada konteks lokal dan solusi lokal, program ini diharapkan mampu bertahan dan berkesinambungan dalam meningkatkan literasi dan numerasi anak Indonesia.

MENINGKATKAN INTEGRITAS UJIAN MELALUI UNBK

Penulis: Oky Adrian/Eviana Hikamuddin



MTS Negeri 6 Bantul

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, membuka Rapat Koordinasi Helpdesk UNBK Provinsi Tahun 2018 di Surabaya (22/1/2018). Dalam rakor yang dihadiri oleh 186 peserta tersebut, Kepala Balitbang menyampaikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) saat ini merupakan arus utama (*mainstream*) dalam pelaksanaan ujian nasional sebagai upaya peningkatan integritas.

la mengungkapkan selama tiga tahun terakhir, jumlah peserta didik dan satuan pendidikan yang melaksanakan UNBK meningkat secara signifikan. "Hal ini patut disyukuri sebagai upaya meningkatkan integritas, sekaligus merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan UNBK dengan baik," ujar Kepala Balitbang.

Terkait penyelenggaraan UN, Ketua BSNP, Bambang Suryadi, mendorong sekolah agar melaksanakan ujian dengan integritas, walaupun saat ini masih muncul fenomena integritas naik tetapi capaian hasil UN menurun. "Kondisi ini merupakan pekerjaan kita bersama, terutama guru-guru, untuk terus berusaha meningkatkan mutu pembelajaran," ujar Bambang.

Pada rakor ini juga disampaikan praktik baik pelaksanaan UNBK oleh Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua. "Tantangan UNBK saat ini adalah keterbatasan dan ketiadaan listrik atau jaringan internet di beberapa daerah terpencil, terutama kepulauan," ungkap salah satu perwakilan. Kemendikbud juga mengapresiasi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena telah berusaha secara maksimal dalam melakukan transformasi Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) ke UNBK. "Kami juga terus mendorong kebijakan berbagi fasilitas (*resource sharing*) terus dilanjutkan," tegas Kepala Pusat Penilaian Pendidikan.

SINDO Journalism Class 2018:

UPAYA MENINGKATKAN INTUISI DAN INISIATIF INSAN MEDIA

Penulis : Diyan Nur Rakhmah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sebuah audensi menyatakan bahwa media merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter (5/10/17). Pemberitaan yang dihasilkan sebuah media merupakan unsur penting dalam menggambarkan citra institusi. Kemampuan pelaku pemberitaan menentukan kualitas berita yang dihasilkan dan gambaran institusi yang disampaikan melalui konten berita dalam sebuah media publikasi. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) dan Koran SINDO menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Berita di kantor Redaksi Koran Sindo, Jakarta. Pelatihan yang berlangsung sejak tanggal 26 sampai dengan 27 Maret 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun bahan informasi dan publikasi khususnya dalam sajian pemberitaan di beragam media komunikasi yang ada dalam lingkungan Kemendikbud.

Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang jurnalistik memberikan pengaruh besar pada kualitas pemberitaan yang dihasilkan media publikasi di berbagai bentuk seperti majalah, buletin, *website* atau bentuk pemberitaan lainnya. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola konten berita, menurut Kepala BKLM Kemendikbud dalam pembukaannya, perlu diperkaya dengan beragam pembekalan dan pengalaman yang dapat memperkaya perspektif pengemasan berita dari berbagai sumber pemberitaan di luar institusi Kemendikbud.

Perkembangan teknologi informasi saat ini, menyebabkan sumber berita dan informasi di masyarakat menjadi semakin beragam, baik yang konvensional seperti majalah dan buletin, ataupun yang bersifat dalam jaringan/*online* seperti *website* dan sosial media. Hal tersebut membutuhkan sumber daya yang mumpuni dalam mengelola pemberitaan dengan beragam bentuk dan kemasan yang menarik pembaca.

Keterampilan pemberitaan, kata Kepala BKLM Kemendikbud tidak sekadar terbatas pada kemampuan penyajian berita secara tertulis, namun perlu diperkaya dengan keterampilan fotografi, dan komunikasi di sosial media. Oleh karenanya, pelatihan jurnalistik yang sifatnya terintegrasi dan menstimulus beragam keterampilan peserta, dibutuhkan



Peserta SINDO Journalism Class 2018 selepas berakhirnya pelatihan di halaman Kantor Redaksi Koran SINDO (Isra Triansyah/Koran SINDO)

untuk meningkatkan kemampuan staf yang berkecimpung di dunia pemberitaan agar tetap kreatif, kritis, profesional dan berwawasan luas walaupun berada dalam lembaga birokrasi.

Rangkaian pelatihan bertajuk “SINDO Journalism Class” ini diikuti oleh peserta dari beberapa unit utama di lingkungan Kemendikbud seperti BKLM, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Teknologi dan Komunikasi, Badan Bahasa dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pelatihan ini terbagi dalam beberapa sesi, yaitu penulisan berita, pengelolaan *website* dan media sosial, fotografi serta *media handling* dengan menghadirkan praktisi yang banyak berkecimpung dalam bidangnya seperti Wakil Pemimpin Redaksi dan Koordinator Fotografi Koran SINDO. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk *workshop*, diskusi dan simulasi pembuatan berita di lapangan hingga menyajikannya kepada khalayak.

“Menulis berita bukanlah proses sekali jadi, dan diperlukan jurnalis yang memiliki sensitivitas tinggi dan kemampuan mumpuni dalam memasukkan unsur manusia pada setiap data yang ditemukannya, agar layak menjadi berita”, ujar Djaka Susila, Wakil Pemimpin Redaksi Koran SINDO dalam salah satu materinya.

RAT KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

CERMINAN BERDEMOKRASI DAN KETERBUKAAN MANAJEMEN

Penulis: Hafidz Muksin / Wina Handayani

Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017 pada tanggal 28 Februari 2018 di Ruang Sidang Graha Utama Lantai 3, Senayan Jakarta. RAT dihadiri oleh Kepala Seksi Koperasi, Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta Pusat, Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta, Kepala Balitbang, Sekretaris Balitbang, dan 276 Anggota Koperasi Balitbang Kemendikbud.

APRESIASI KEPADA KOPERASI PEGAWAI BALITBANG

Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud mendapatkan apresiasi sebagai Koperasi Berprestasi yang melaksanakan RAT lebih awal dibandingkan koperasi lainnya yang ada di Jakarta Pusat. "Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta Pusat, sangat mengapresiasi Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud yang telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa pengurus dan pengawas wajib melaksanakan RAT tiga bulan setelah tutup buku" papar Tumarno.

Menurut catatan dari Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud menempati urutan yang ke 35 dari sekitar 1.500 koperasi di seluruh Jakarta Pusat yang melaksanakan RAT lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa Pengurus Koperasi tepat dalam pembukuan dan pengalokasian sehingga tidak ada masalah dalam pertanggungjawabannya. Selain itu pengawasan akuntan publik dari pihak luar menunjukkan adanya keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan. RAT merupakan kekuasaan tertinggi yang intinya adalah koperasi merupakan milik seluruh anggota. "RAT Koperasi Pegawai Balitbang dapat berjalan tertib, lancar, berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati bersama" harap Tumarno.

RAT SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA ANGGOTA

Hafidz Muksin selaku Ketua Koperasi menyampaikan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pencerminan berdemokrasi dalam tata kehidupan berorganisasi yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas tahun buku 2017 adalah agar dicermati, dibahas, dievaluasi, dan disetujui oleh peserta rapat, dan selanjutnya untuk disahkan dalam RAT. Pengurus telah berupaya melaksanakan tugas yang diamanatkan anggota secara konsisten, dengan bekerja keras menumbuhkembangkan unit usaha yang berpotensi memberikan manfaat

dan keuntungan secara maksimal kepada Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud untuk saat ini dan masa yang akan datang.

PENINGKATAN LAYANAN KEPADA ANGGOTA

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud telah mengembangkan *website* untuk peningkatan layanan kepada Anggota yang dapat diakses melalui <http://koperasi-litbangdikbud.com>. "Melalui laman tersebut, anggota dapat mengetahui simpanan dan sisa angsuran yang harus dipenuhi tiap bulan" papar Hafidz. Di samping itu, Anggota juga dapat mengajukan pinjaman secara *online*, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, serta mengetahui laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus.

Berbagai upaya telah dilakukan sebagai bentuk peningkatan kapasitas manajemen Koperasi antara lain melalui bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan kepada para pengurus, pengawas dan karyawan. Di samping itu, mengantisipasi persaingan dengan dunia perbankan yang ada di lingkungan kantor Kemendikbud, RAT telah memutuskan kenaikan pagu pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) dengan masa angsuran 10 tahun, serta penurunan jasa pinjaman menjadi 0,70% perbulan.

Dalam bidang pendidikan dan sosial, Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud secara rutin tiap tahun memberikan santunan pendidikan kepada anak yatim/piatu dan anak pegawai golongan I dan II yang masih duduk pada satuan pendidikan dasar dan menengah, santunan pada Anggota yang pensiun, serta bingkisan lebaran dalam bentuk natura. RAT juga memberikan berbagai hadiah dalam bentuk *doorprize* yang diberikan kepada peserta RAT.

Dalam sambutannya Totok Suprayitno, Kepala Balitbang selaku Dewan Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud mengarahkan agar pengelolaan Koperasi dilakukan dengan cermat dan hati-hati, "Perlu peningkatan usaha yang dapat memberikan kebermanfaatn kepada Anggota Koperasi, dengan melihat peluang yang ada" harap Totok.

PEMBINAAN PEGAWAI SEKRETARIAT BALITBANG TAHUN 2018:

“Refleksi Diri Massal untuk Meningkatkan Peran Masing-masing Pegawai agar Organisasi Menjadi Lebih Baik Ke depannya”

Penulis : Hafidz Muksin / Wina Handayani

Forest Resort Hotel, Bogor 23-25 Maret 2018, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Pegawai Sekretariat Balitbang dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Balitbang Kemendikbud.



Sekretariat Balitbang Kemendikbud terdiri dari Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Tata Laksana, Bagian Umum dan Fasilitas Badan Independen yaitu BSNP, BAN S/M dan BAN PAUD & PNF.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Tata Laksana ini diikuti oleh 166 peserta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beberapa Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS). Acara pembukaan diselenggarakan di Ruang Sidang Graha, Gedung A Lantai 3, Kemendikbud, Senayan. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan undangan yaitu Bapak Totok Suprayitno, Kepala Balitbang, Bapak Dadang Sudiyarto, Sekretaris Balitbang, Para pimpinan eselon III and IV di lingkungan Sekretariat Balitbang, pegawai Balitbang (peserta) dan undangan yaitu Bapak Sujana dan Bapak Ridwan dari Inspektorat Jenderal.

“Inti dari kegiatan ini adalah menjalin silaturahmi serta untuk menguatkan peran dari masing-masing pegawai baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan”, kata Dadang Sudiyarto, Sekretaris Balitbang. Selain itu, serangkaian acara

seperti Informasi terbaru tentang Tata Nilai Budaya Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk pencerahan bagi pegawai yang disampaikan oleh Bapak Sujana dan Bapak Ridwan dari Inspektorat Jenderal.

Penandatanganan Pakta Integritas, penyerahan Plakat Uraian Tugas Pekerjaan dalam kegiatan ini dilakukan bagaimana memahami dan mencoba sambil bermain.

Bapak Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud, pada kesempatan itu menyampaikan, “Untuk menjadi baik itu hanya ada di dalam diri. Totok sangat mengapresiasi atas terlaksananya program ini, bila ini merupakan salah satu cara untuk merefleksi diri, tidak masalah bila dilakukan secara masal agar ke depan suatu organisasi /Institusi bisa menjadi lebih baik dan tidak ada yang merugi. Harapannya jika setiap hari kinerja pegawai membaik organisasi pun bisa menjadi lebih baik.”

Perubahan cara pandang atau pola pikir (*mindset*) yang perlu dirubah sebaiknya dilakukan perubahan, contoh sistem yang semula serba tunai menjadi non tunai agar dapat diketahui untuk



apa saja yang dipergunakan. Selain itu seorang pegawai tidak hanya sekedar menjalankan apa yang diinstruksikan oleh institusi saja, tetapi bisa memahami apa manfaat agar hasilnya menjadi lebih bermakna, potensi yang dimiliki pun bisa berkembang.

Setelah acara pembukaan selesai, peserta bergerak menuju bus yang telah disediakan lalu berangkat menuju *Forest Resot Hotel*, Bogor. Di hari berikutnya, setelah melakukan senam pagi, peserta dikumpulkan di suatu tempat. Kegiatan kemudian dipandu oleh para motivator yang ditunjuk. Mereka mengadakan berbagai macam permainan untuk menyegarkan dan menyatukan peserta yang semula berada dalam satu kelompok bagian dan satu kelompok Badan Independen oleh motivator di acak.

Peserta harus bekerja bersama sepanjang hari. Mereka begitu bersemangat, bergerak, berteriak dan berlomba sambil bermain. Selain kegiatan di luar ruangan dengan aktivitas yang menguras tenaga dan keringat, peserta kemudian dipandu untuk memasuki sebuah ruangan. Para peserta diminta menuang air dari dalam botol air mineral ke dalam sebuah gelas hingga habis. Motivator ingin mengetahui persepsi setiap peserta dari permainan tersebut. Pada permainan lainnya, peserta diminta menempelkan searik kertas pada punggung mereka lalu mereka harus mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menuliskan kesan dan pesan mereka selama ini pada kertas tersebut. Lalu motivator meminta peserta untuk membaca apa yang tertulis dan membawanya pulang. Begitu banyak permainan yang menarik. Terdapat pula beberapa lomba yang dilakukan seperti pertandingan tenis meja, futsal, dan menangkap ikan.

Selain permainan dalam kegiatan ini juga dilakukan pembagian hadiah dengan kategori yaitu Penilaian Lomba 3 K (Kebersihan, Kerapihan, dan Kenyamanan), Penilaian Pegawai Teladan

dan Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan. Penilaian untuk kategori tersebut dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pegawai Sekretariat Balitbang.

Pada acara puncak di malam hari setiap Bagian menampilkan suatu yang dimilikinya. Bagian Umum menampilkan tarian *Baby Shark*. Pegawai menggunakan sarung dan dot lalu mereka menari layaknya seorang bayi. Bagian Hukum dan Tata Laksana menampilkan pertunjukan berupa sandiwara yang sangat kreatif dengan kain hitam terbentang sepanjang panggung. Terdapat lobang-lobang untuk memasukan kepala dan tangan sehingga terlihat seperti seorang yang berukuran kecil.

Bagian Keuangan menampilkan tarian daerah yang dikolaborasi dengan tarian topeng dari sarung dengan bentuk mata dan senyum yang berbeda-beda. Sedangkan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menampilkan sebuah paduan suara. Menyanyikan lagu nasional berjudul *Tanah Air* dan *More than words*. Badan Independen juga ikut tampil. Atraksi yang berbeda-beda itu mendapat perhatian Sekretaris Balitbang yang ikut dan berperan aktif dalam kegiatan ini begitu juga dengan para peserta. Pertunjukan paling atraktif dimenangkan oleh Bagian Umum sebagai juara pertama lalu disusul oleh Bagian Hukum dan Tata Laksana juara kedua. Di akhir acara para peserta membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu "Kemesraan".

Apresiasi yang luar biasa disampaikan kepada peserta yang sejak awal hingga akhir konsisten mengikuti kegiatan. "Tidak disangka, ternyata begitu banyak bakat-bakat terpendam yang muncul dan baru terlihat dalam kegiatan ini" kata Sekretaris Balitbang. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada para motivator dan *Forest Resort Hotel*, hingga acara dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

MUSEUM DI INDONESIA SEPI PENGUNJUNG?

Penulis: Herman Hendrik

Kunjungan ke museum merupakan kegiatan yang dianggap penting mengingat besarnya peran museum bagi masyarakat. Museum setidaknya berperan bagi sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Dalam sektor ekonomi, museum dapat menjadi daya tarik wisata yang mengundang kunjungan wisatawan ke suatu daerah di mana suatu museum berlokasi. Sementara itu, dalam sektor pendidikan, museum berperan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Peran-peran tersebut ditunjang dengan fungsi museum sendiri, yaitu pendidikan, penelitian, dan kesenangan (*leisure*).

Namun, selama ini telah beredar narasi bahwa orang Indonesia belum, untuk tidak mengatakan tidak, gemar berkunjung ke museum. Dalam cara pandang lain, museum-museum di Indonesia sepi dari pengunjung. Benarkah hal itu? Hal ini penting untuk dibahas karena kunjungan ke museum perlu digiatkan agar fungsi museum berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan museum.

Jika kita telisik lebih dalam, ada dua poin yang dapat kita tangkap dari permasalahan tentang rendahnya tingkat kunjungan ke museum di Indonesia ini. *Pertama*, beberapa museum di Indonesia tidak dapat dianggap sepi dari pengunjung karena secara kasat mata museum-museum tersebut memang selalu diramaikan oleh pengunjung. Biasanya, museum-museum yang ramai itu berlokasi di tempat strategis, misalnya berdekatan dengan atraksi wisata, serta menjadi ikon dari daerahnya, misalnya ikon nasional atau kota.

Untuk sekedar memberi contoh, dapatlah kita tunjuk Museum Nasional (Museum Gajah) dan museum-museum di kawasan Kota Tua Jakarta di Jakarta, Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta, serta Museum Angkut di Malang. Sebagai ilustrasi, tabel berikut menunjukkan jumlah kunjungan ke beberapa museum di Jakarta dalam rentang waktu lima tahun, dari tahun 2007 hingga 2011.

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa museum di Jakarta dikunjungi oleh lebih banyak pengunjung daripada beberapa museum lainnya. Sebagai contoh yaitu Museum Nasional dan Museum Sejarah Jakarta, atau biasa dikenal juga sebagai Museum Fatahillah. Selama lima tahun tersebut, jumlah kunjungan ke dua museum itu selalu yang terbanyak. Jika profil kedua museum tersebut kita telusuri, maka kita akan maklum bahwa keduanya terletak di kawasan wisata serta termasuk ikon kawasan tersebut. Museum Nasional terletak di Jl. Merdeka

Tabel Jumlah Kunjungan ke Beberapa Museum di Jakarta

No.	Museum	Tahun/Jumlah Kunjungan				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Museum Nasional	157.905	104.739	165.907	375.710	193.864
2	Museum Satria Mandala	48.591	77.525	53.769	63.797	85.490
3	Museum Sejarah Jakarta	75.067	119.641	271.008	724.082	437.040
4	Museum Tekstil	33.665	27.291	31.516	43.107	53.485
5	Museum Bahari	14.080	9.807	15.241	6.327	24.076
6	Museum Seni Rupa dan Keramik	23.332	27.329	47.250	76.713	35.966
7	Museum Wayang	28.941	44.784	77.333	164.696	202.489
8	Museum Joang '45	10.496	14.199	15.756	17.501	18.370

Sumber: www.jakarta-tourism.go.id

Barat, berdekatan dengan daya tarik wisata lain, di antaranya yaitu Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Sementara itu, Museum Sejarah Jakarta berlokasi di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, yang di dalamnya juga terdapat beberapa atraksi wisata lain.

Kedua, ada masalah dalam cara kita mendefinisikan tingkat kunjungan ke museum. Apa batasan bahwa suatu museum itu ramai dikunjungi? Berapa jumlah pengunjung yang harus tercatat sehingga suatu museum dikatakan ramai oleh pengunjung atau memiliki tingkat kunjungan yang tinggi? Selama ini, untuk melihat tingkat kunjungan ke museum-museum di Indonesia, yang berlaku adalah perbandingan dengan jumlah kunjungan ke museum-museum lain di luar negeri pada suatu waktu atau rentang waktu tertentu. Contohnya yaitu seperti yang dilakukan oleh Mulyadi (2013) yang membandingkan Museum Mpu Tantular di Sidoarjo dengan Museum Louvre di Paris, Perancis. Perbandingan seperti itu sebetulnya sudah baik untuk sekedar melihat gambaran atau melakukan pengukuran berdasarkan standar atau *benchmark* tertentu. Namun, metode tersebut tidak dapat diandalkan sepenuhnya karena mengandung masalah. Masalahnya terutama terletak pada pengabaian faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kunjungan ke Museum Mpu Tantular dengan Museum Louvre. Sepertinya sudah menjadi pemahaman bersama bahwa banyak ketidaksetaraan dalam perbandingan antara kedua museum tersebut. Di sana ada faktor tingkat kunjungan wisatawan ke kota tempat kedua museum tersebut berlokasi, jumlah koleksi museum, luas bangunan atau area museum, fasilitas yang disediakan museum, daya tampung museum, dan seterusnya.

Hingga titik ini, dapat dipahami bahwa melihat jumlah kunjungan ke museum sebagai suatu pencapaian sebetulnya bermasalah. Masalahnya yaitu adanya banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan ke museum. Untuk itu, perlu dipikirkan suatu pendekatan alternatif untuk melihat tingkat kunjungan ke museum. Pendekatan tersebut dapat berupa indeks yang memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan tingkat kunjungan ke suatu museum.

Berdasarkan poin pertama yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa lokasi museum berpengaruh terhadap jumlah kunjungan. Museum yang berlokasi di tempat strategis, misalnya berada di dalam kawasan wisata, berpeluang untuk dikunjungi lebih banyak orang. Selain itu, museum yang menyandang status ikonik, misalnya merupakan ikon suatu kota atau daerah, juga berpeluang lebih besar

untuk dikunjungi. Dalam hal ini, Museum Nasional merupakan contoh baik, karena letaknya di kawasan wisata kota sekaligus juga merupakan ikon kota Jakarta.

Sementara itu, poin kedua memberikan gambaran tentang adanya hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika menghitung tingkat kunjungan ke museum. Semata-mata melihat jumlah kunjungan ke suatu museum tidak membantu memahami tingkat kunjungan ke museum tersebut secara menyeluruh. Fakta bahwa suatu museum dikunjungi sekian ribu orang dalam setahun hampir tidak bermakna apapun dalam rangka mencari tahu bahwa suatu museum memiliki tingkat kunjungan tinggi atau rendah. Demikian pula dengan perbandingan jumlah kunjungan suatu museum dengan museum lain. Pendekatan seperti itu tidak dapat diandalkan karena karakteristik museum-museum yang dibandingkan bisa jadi sangat berlainan. Sebagai ilustrasi, tentu tidak bijak untuk membandingkan jumlah kunjungan dua museum yang berbeda luas bangunan atau luas area museumnya. Suatu museum tentu memiliki batas jumlah kunjungan sehubungan dengan daya tampungnya. Jadi, jumlah pengunjung ke suatu museum lebih sedikit bukan berarti museum tersebut tingkat kunjungannya rendah. Hal tersebut bisa saja terkait dengan terbatasnya ruang yang ada di museum dimaksud.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain untuk memahami tingkat kunjungan ke suatu museum. Dari sini, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk memahaminya. Beberapa hal tersebut misalnya tingkat kunjungan wisatawan domestik (nusantara) ke kota tempat kedua museum tersebut berlokasi dan luas bangunan atau area museum, atau hal lain yang berhubungan dengan daya tampung museum. Dalam hal ini, perlu dijajaki kemungkinan melakukan perhitungan tingkat kunjungan ke suatu museum tidak hanya melihat jumlah pengunjung dalam suatu waktu atau rentang waktu saja, tetapi dengan menghitung rasio tertentu. Dalam tulisan ini, pendekatan yang diusulkan yaitu menghitung rasio antara luas bangunan atau area museum dengan jumlah pengunjung dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu serta rasio antara jumlah wisatawan domestik ke suatu kota dengan jumlah pengunjung suatu museum yang berada di kota tersebut dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu.

UJIAN NASIONAL SMP: UNBK NYAMAN DAN PRAKTIS

Penulis: Meni Handayani

Ujian Nasional merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Kemendikbud menyatakan Ujian Nasional (UN) 2018 diikuti oleh 8,1 juta peserta didik. Mereka berasal dari 95.780 satuan pendidikan dari berbagai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)/ sederajat dan pendidikan kesetaraan.

Tercatat baru dua daerah yang telah seluruhnya melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP, yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. UN SMP tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 23 sampai dengan 26 April 2018, dengan mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu pengetahuan Alam.

Artikel ini akan menggambarkan tentang pelaksanaan UN jenjang SMP pada tahun 2018 di tiga daerah yakni Kabupaten Klaten, Kota Binjai dan Kota Ambon.

APA DAN BAGAIMANA PENYELENGGARAAN UN DI DAERAH

Penyelenggaraan UN jenjang SMP dikoordinasikan pada tingkat Kabupaten/Kota dengan membentuk panitia Ujian Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menunjukkan sebanyak 111 SMP di Kabupaten Klaten telah melaksanakan UNBK, yang terdiri dari 65 SMP Negeri, 22 SMP swasta serta 24 MTs. Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) masih dilaksanakan di 22 sekolah, yaitu 20 SMP dan 2 MTs. Jumlah siswa yang mengikuti UN baik UNBK dan UNKP adalah sebanyak 17.752 siswa yang didominasi oleh siswa SMP Negeri, yaitu sebanyak 13.413 siswa.

Berbeda dengan Kabupaten Klaten, jumlah sekolah yang melakukan UNBK di Kota Ambon masih belum sebanyak UNKP. Dari jumlah 57 SMP/MTs yang melaksanakan UN, baru 12 sekolah yang melaksanakan UNBK, dan 45 Sekolah masih mengikuti UNKP.

Di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebanyak 6.065 siswa SMP mengikuti UN dengan berbasis komputer dan juga berbasis kertas pensil. Data

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai menunjukkan bahwa sebanyak 27 SMP mengikuti UNBK, dan 25 sekolah lainnya masih ujian dengan menggunakan kertas dan pensil.

PELAKSANAAN UN DI SEKOLAH

Di hari pertama pelaksanaan UNBK, terjadi gangguan jaringan dengan *server* pusat yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan ujian di beberapa daerah termasuk Kabupaten Klaten, Kota Ambon dan Kota Binjai. Di Kabupaten Klaten misalnya, masalah pada *server* pusat menyebabkan pelaksanaan UNBK tertunda selama 40 menit. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi di Kota Binjai yang baru dapat memulai UNBK pada pukul 09.15.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui siaran persnya pada 30 April 2018 mengatakan bahwa jumlah peserta UNBK tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Prosedur penyelenggaraan UNBK tahun ini menggunakan sistem semi dalam jaringan (*daring*), dimana soal dikirim dari *server* pusat secara *online* untuk kemudian disinkronisasi ke *server* lokal (sekolah). *Server* lokal (sekolah) kemudian melayani ujian siswa secara luar jaringan (*luring*), dengan hasil ujian dikirim kembali melalui *server* lokal (sekolah) ke *server* pusat secara *online* melalui proses pengunggahan.

Hasil pemantauan tiga wilayah pelaksanaan UNBK SMP menunjukkan bahwa pelaksanaan ujian dilakukan dalam dua atau tiga sesi karena keterbatasan jumlah komputer. Bagi sekolah yang pada tahun sebelumnya telah lebih dulu melakukan UNBK secara mandiri, relatif tidak menemukan hambatan dalam menyediakan unit komputer untuk pelaksanaan ujian. Beberapa sekolah hanya melakukan penambahan jumlah komputer karena komputer yang tersedia dinilai kurang memadai. Sedangkan bagi sekolah yang baru pertama kali menyelenggarakan UNBK, penyediaan unit komputer dilakukan melalui pengadaan mandiri di sekolah atau menyewa dengan bantuan komite sekolah dan orang tua siswa.

Diantara 26 siswa pelaksana UNBK yang disurvei menyatakan setuju dengan pelaksanaan UNBK, dengan alasan kenyamanan dan kepraktisan.

Pelaksanaan UNBK memerlukan pasokan listrik yang stabil sehingga untuk menanggulangi kendala yang kemungkinan terjadi adalah dengan membangun kerja sama antara sekolah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Genset juga disiapkan sebagai langkahantisipasi hambatan listrik yang dimungkinkan terjadi, layaknya yang terjadi di Kabupaten Klaten.

Serupa dengan UNBK, pelaksanaan UNKP di tiga kabupaten/kota juga berjalan relatif lancar. Naskah UN diterima dalam keadaan lengkap, dan selepas pelaksanaan ujian dilaporkan kembali oleh sekolah ke sub rayon disertakan dengan pengiriman Lembar Jawaban Komputer (LJK) ke dinas Pendidikan kota/kabupaten dan dinas pendidikan provinsi.

KESIAPAN SISWA MENGHADAPI UN

Kesiapan siswa dalam menghadapi UN menjadi salah satu fokus perhatian sekolah, walaupun UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Pendalaman materi melalui pelajaran tambahan atau latihan soal (*try out*) dilakukan sekolah sebanyak dua sampai dengan empat kali sebelum UN berlangsung. Melalui upaya tersebut, siswa diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk soal yang diujikan sehingga tidak kesulitan dalam menjawab semua pertanyaan ujian.

Hasil survei yang dilakukan pada 35 siswa yang mengikuti ujian menunjukkan bahwa secara umum, soal yang diujikan sesuai dengan soal yang siswa hadapi ketika pendalaman materi dan *try out* yang diberikan sekolah, kecuali pada mata pelajaran Matematika. Siswa menemukan kesulitan dalam menyelesaikan soal mata pelajaran Matematika karena soal yang diujikan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan di kelas. Soal Matematika lebih banyak disesuaikan dengan tujuan pembelajaran guna menstimulus kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTs*).

PENDAPAT SISWA TENTANG UNBK DAN UNKP

Beragam pandangan muncul dari siswa menanggapi pelaksanaan Ujian Nasional, baik UNBK maupun UNKP. Diantara 26 siswa pelaksana UNBK yang disurvei menyatakan setuju dengan pelaksanaan UNBK, dengan alasan kenyamanan dan kepraktisan. Terkait pelaksanaan UNBK tersebut, siswa menyarankan untuk meningkatkan intensitas latihan ujian dengan berbasis komputer, penyediaan komputer untuk ujian yang berkualitas lebih baik, dan pelaksanaan UNBK di sekolah sendiri pada sekolah yang masih menumpang ke sekolah lain dalam penyelenggaraan UNBK-nya.

Hasil survei siswa yang mengikuti UNKP juga menemukan hal yang tidak jauh berbeda dengan hasil survei pada siswa peserta UNBK. Dari sebanyak 33 siswa yang disurvei, sebagian besar responden menyatakan setuju dengan pelaksanaan ujian dengan berbasis kertas dan pensil (23 orang) oleh karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer dan listrik yang memadai, khususnya bagi sekolah yang berada di daerah terpencil.

Sebagian siswa mengakui ingin beralih pada UNBK karena pada UNKP, pengisian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) seringkali memunculkan kecemasan siswa tentang apakah hasil LJUN terbaca pada mesin pemindai (*scanner*) atau tidak. Selain itu, kertas LJUN juga belum memiliki kualitas yang baik, sehingga mudah rusak ketika dihapus. Penggunaan komputer dalam pelaksanaan UN dinilai memudahkan dan efektif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran soal.

TANTANGAN DAN SOLUSINYA

Selain pasokan listrik dan ketersediaan perangkat komputer, motivasi siswa dan dukungan orang tua murid juga menjadi tantangan dalam peralihan pelaksanaan UNKP menuju UNBK. Tidak semua siswa yakin memiliki kemampuan untuk mengoperasikan perangkat komputer apalagi untuk pelaksanaan ujian. Pada sekolah yang telah aktif melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa dalam menyediakan perangkat komputer yang dapat digunakan untuk pelaksanaan ujian, UNBK tidak menjadi masalah. Namun bagi orang tua yang masih belum memahami pentingnya peralihan pelaksanaan UN dari berbasis kertas dan pensil menjadi berbasis komputer, pelaksanaan UNBK akan terkendala. Sosialisasi berkala tentang pentingnya peralihan metode pelaksanaan UN dengan melibatkan teknologi informasi di dalamnya perlu dilakukan juga kepada siswa dan orang tua murid, guna memperlancar pelaksanaan UN di kemudian hari sebagai salah satu alat refleksi dan acuan untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran.

MEMBANGUN NASIONALISME MASYARAKAT DI KABUPATEN NATUNA

Penulis: Budiana Setiawan



Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan wilayah terluar dan berjarak paling jauh dari ibu kota provinsi. Wilayah kabupaten ini berupa gugusan kepulauan di tengah Laut Natuna Utara. Kepulauan Natuna termasuk Kepulauan Anambas telah dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Delegasi RI, Provinsi Sumatera Tengah, pada tanggal 18 Mei 1956. Pada masa lalu Malaysia pernah mengklaim bahwa Kepulauan Natuna seharusnya masuk ke dalam wilayah mereka dikarenakan dua alasan. Pertama, secara geografis wilayah Kepulauan Natuna "terjepit" di antara Semenanjung Malaysia dan Sabah serta Sarawak. Bila ditarik garis lurus pada ujung selatan Semenanjung Malaysia dan Sarawak, maka Kepulauan Natuna seharusnya menjadi wilayah Malaysia. Kedua, berdasarkan sejarah, sejak tahun 1597 Kepulauan Natuna termasuk dalam wilayah Kesultanan Johor, Malaysia.

Indonesia menjadikan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya berdasarkan Traktat London tahun 1824. Namun di sisi lain, Malaysia mengklaim bahwa Kepulauan Natuna tidak pernah benar-benar dikuasai Belanda, seperti halnya Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Menurut Malaysia, Traktat London tidak menempatkan Kepulauan Natuna di bawah kekuasaan Inggris maupun Belanda, tetapi di bawah kekuasaan Kesultanan Melayu Johor yang pada waktu itu sudah di bawah pengaruh Inggris.

Pada tahun 1956 wilayah Kepulauan Natuna diklaim sebagai bagian dari wilayah Indonesia karena ada bukti jejak-jejak kekuasaan Belanda di kepulauan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Belanda pernah membangun lapangan udara untuk pertahanan militer di Pulau Bunguran. Ketika terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1962-1966, Kepulauan Natuna menjadi wilayah yang disengketakan oleh kedua negara. Namun dengan

pertimbangan politis pada saat itu, pada akhirnya Malaysia memilih jalan damai dan membiarkan Kepulauan Natuna menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

Di bidang ekonomi, masyarakat Natuna telah sejak lama menjalin hubungan perdagangan dengan masyarakat Sarawak. Banyak barang kebutuhan sehari-hari yang didatangkan dari Kota Kuching. Sebaliknya, masyarakat Natuna juga menjual komoditas perkebunan dan perikanan kepada para pedagang dari Sarawak, karena secara geografis memang lebih dekat daripada ke Indonesia. Sebelum tahun 1960-an masyarakat juga masih menggunakan mata uang ringgit. Mata uang rupiah baru dikenakan setelah terjadi Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Meskipun demikian, mata uang ringgit tidak serta-merta hilang, sehingga pada saat itu masyarakat Natuna menggunakan ringgit dan rupiah sekaligus. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 2000.

Di bidang sosial budaya, masyarakat Natuna berbicara dengan bahasa Melayu dialek Malaysia. Sejak puluhan tahun lamanya, masyarakat Natuna juga hanya mendapatkan informasi melalui siaran radio dan televisi dari Malaysia, sehingga tidak mengherankan bila mereka lebih mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Malaysia daripada di Indonesia. Baru pada tahun 1983 mereka mulai dapat menikmati siaran radio dan televisi dari Indonesia.

Mobilitas masyarakat Natuna ke wilayah Indonesia lainnya juga terbatas, karena satu-satunya alat transportasi yang tersedia pada saat itu hanya kapal laut. Jalur pelayaran, khususnya yang menuju Batam dan Tanjungpinang sering terhenti dengan sering terjadinya gelombang besar di Laut Natuna Utara.

Menilik perjalanan sejarah masyarakat Natuna, yang pernah menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Johor, dikuasai Belanda, dan akhirnya menjadi

bagian dari wilayah Indonesia, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya yang lebih dekat dengan Malaysia daripada Indonesia, tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan rasa nasionalisme mereka? Terlebih lagi, menurut John Hutchinson (2004), nasionalisme lebih merupakan fenomena budaya daripada fenomena politik, karena ia berakar pada etnisitas dan budaya pramodern. Lalu, apakah nasionalisme itu? Nasionalisme adalah suatu paham atau ideologi untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.

Menurut Retno Listiyarti (2007), nasionalisme terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil), yakni negara memperoleh legitimasi politik dari partisipasi aktif rakyatnya dan keanggotaannya bersifat sukarela. Kedua, nasionalisme etnis, yakni negara memperoleh legitimasi politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat, dan keanggotaannya bersifat turun-temurun. Ketiga, nasionalisme romantik, yakni negara memperoleh legitimasi politik sebagai sesuatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari suatu bangsa atau ras. Nasionalisme romantik ini menitikberatkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik mereka. Keempat, nasionalisme budaya, yakni negara memperoleh legitimasi politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun. Kelima, nasionalisme kenegaraan, yakni nasionalisme kewarganegaraan yang dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, sebuah bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Keenam, nasionalisme agama, yakni negara memperoleh legitimasi politik atas dasar persamaan agama.

Dari keenam bentuk nasionalisme tersebut, tampaknya yang sesuai untuk diterapkan pada masyarakat Natuna pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya adalah nasionalisme kenegaraan, yang merupakan kombinasi antara kewarganegaraan dengan etnisitas. Dalam hal ini secara kewarganegaraan, masyarakat Natuna secara legitimasi politik adalah bagian dari warga negara Indonesia. Secara etnisitas, sebagian besar masyarakat Natuna adalah etnis Melayu. Dalam hal ini etnis Melayu tidak hanya terdapat di satu negara, melainkan tersebar beberapa negara, yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dengan demikian, masyarakat Natuna secara alamiah mempunyai ikatan etnisitas dengan masyarakat Melayu yang tinggal di wilayah Indonesia, terutama dengan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, pesisir timur Sumatera, dan pesisir barat Kalimantan.

Penguatan rasa nasionalisme sebagai bagian dari bangsa Indonesia mustahil dapat ditumbuhkan pada

masyarakat Natuna selama pemerintah pusat tidak pernah memberikan perhatian dan pembangunan pada mereka sebagai masyarakat yang tinggal di daerah terluar. Oleh karena itu, saat ini pemerintah pusat mulai memberikan perhatian pada masyarakat Natuna, yang diawali dengan pengesahan sebagai wilayah otonom baru.

Pada tanggal 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten tersendiri dengan wilayah meliputi gugusan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008, dibentuk kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna, yakni Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan wilayah gugusan Kepulauan Anambas yang terletak di sebelah barat daya Kepulauan Natuna.

Semenjak berdiri sebagai kabupaten tersendiri, wilayah Kepulauan Natuna mulai diperhatikan dan berbenah. Apalagi setelah pada tanggal 24 September 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, dibentuk Provinsi Kepulauan Riau, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Riau. Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau ini, memperpendek jarak antara Kabupaten Natuna dengan Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan provinsi. Berangsur-angsur kabupaten ini mulai terangkat dari keterisolirannya. Untuk mobilitas masyarakat di Kabupaten Natuna, saat ini tidak hanya dilayani oleh kapal laut, tetapi juga penerbangan Natuna-Batam setiap hari. Di samping itu, juga tengah dibangun infrastruktur jalan mengelilingi Pulau Bunguran, yang merupakan pulau terbesar dan terbanyak penduduknya di Kabupaten Natuna.

Sebagai wilayah terluar dengan laut yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain, maka perlu penguatan di bidang pertahanan dan keamanan. Saat ini tengah dibangun infrastruktur untuk basis militer dan telah diterjunkan sekitar dua ribu pasukan TNI untuk menjaga keamanan, mengingat Laut Natuna Utara juga menjadi jalur pelayaran internasional.

Di bidang komunikasi dan informasi, saat ini telah dibangun sarana dan prasarana telekomunikasi, sehingga masyarakat Natuna telah dapat menikmati siaran radio dan televisi dari Indonesia. Dengan demikian, mereka memperoleh informasi dan berita yang berimbang antara Indonesia dan Malaysia, serta dapat memilih dan memilah, mana yang lebih sesuai dengan jati diri mereka saat ini yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

REFERENSI:

- Hutchinson, John. 2004. *Myth Against Myth: The Nation as Ethnic Overlay Nations and Nationalism*
- Listiyarti, Retno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

KREATIFITAS DAN INOVASI PENDIDIK DALAM PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN

Penulis: Heru Setyono

Pembelajaran adalah wahana untuk mewujudkan atau merealisasikan kurikulum. Pendidik harus mempelajari semua perangkat kebijakan kurikulum dan menyusun perencanaan yang matang. Dalam mempelajari perangkat kebijakan kurikulum dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi agar pesan-pesan yang terdapat dalam kebijakan tersebut dapat diaktualisasikan dalam pembelajaran secara efektif.

Proses pembelajaran terwujud akibat adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, media, bahan, alat, sumber, dan muatan pelajaran serta berbagai komponen lainnya. Proses tersebut mengandung muatan mata pelajaran, muatan daerah dan muatan sekolah. Oleh karena itu, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, maka pembelajaran harus bersifat kontekstual, mengakomodasi kearifan atau keunggulan lokal serta bersifat situasional, relevan dengan persoalan kekinian. Pembelajaran dapat berlangsung secara terpisah antara mata pelajaran dan bisa juga berlangsung secara integratif melalui pendekatan tematik.

Sejalan dengan tingkat perkembangan peserta didik, pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan bermakna merupakan sebuah keharusan karena di samping merupakan kebutuhan, juga sesuai dengan karakteristik dunia anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pemikiran yang kreatif dan keberanian mencoba atau mengeksplorasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai lembaga yang ditugasi untuk melakukan pengembangan kurikulum, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) juga memiliki tugas untuk memberikan inspirasi berbagai model inovasi pembelajaran kepada para pendidik, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam suatu kesempatan, tim Puskurbuk melakukan kunjungan ke empat sekolah di sekitar Jakarta, yaitu: SD Kupu-Kupu, Sekolah Lazuardi, SD Cikal, dan SD Negeri Menteng 03 Pagi.

SD KUPU-KUPU

SD Kupu-Kupu letaknya agak terpencil, jauh dari pinggir jalan raya sehingga terhindar dari kebisingan lalu lintas dan polusi udara, suasananya nyaman dan bernuansa hijau karena penuh dengan pepohonan. Menurut keterangan pemilik sekolah, Damayanti Jusuf, sekolah ini dibangun di pekarangan rumah karena pada waktu itu kesulitan mencari sekolah yang tepat untuk putranya. "Sekolah-sekolah bagus dan bertaraf internasional hampir semua menggunakan bahasa

Inggris sebagai pengantar dan seolah tidak peduli dengan sejarah kebangsaan", ujarnya. Pemikiran ini mendorong Damayanti untuk membangun sekolah.

SD Kupu-Kupu didirikan oleh Yayasan Budaya Cerdas atas dasar semakin dibutuhkannya SD dengan pengajaran yang berorientasi pada metode belajar *active learning*. Sekolah ini mengembangkan program belajar mengajar yang didasarkan atas asas kebangsaan, keilmuan dan budi pekerti. Siswa didik untuk menghargai kemanusiaan, memahami masalah negara, tanah air dan budayanya. Demikian juga untuk pelajaran Agama diberikan dalam rangka meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut siswa dan toleransi beragama di masyarakat yang majemuk.

Di sekolah ini pembelajaran bersifat *active learning*. Untuk mendukung hal itu, SD Kupu-Kupu menciptakan lingkungan budaya, yaitu lingkungan belajar yang menjunjung tinggi harmoni, aman, menantang, menyenangkan, adil, kreatif, terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Semangat dedikatif dari para pendidiknya sangat menunjang keberhasilan sekolah ini untuk menghasilkan lulusan yang mencintai tanah air, lingkungan alam dan budaya sekitar. Strategi yang dikembangkan memberikan jaminan anak-anak menjadi insan yang bertakwa, berkualitas secara intelektual, memiliki karakter yang kuat dan handal dalam menjawab tantangan, sosok pribadi yang tangguh, ulet, kompetitif, dan selalu proaktif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, menghadapi tuntutan zaman dan berperan aktif dalam perkembangan ilmu dan teknologi.

"Mempersiapkan anak bangsa menjadi manusia yang manusiawi, memiliki jiwa kebangsaan dan semangat keilmuan yang tinggi, bertakwa dan toleran, berbudipekerti luhur, jujur dan memiliki integritas, berdisiplin tinggi, mandiri, mampu berkompetisi, serta mampu menghadapi tuntutan zaman merupakan cita-cita luhur SD Kupu-Kupu", tegas Damayanti. "Dalam pembelajaran tema-tema yang ada di Kurikulum 2013, SD Kupu-kupu



Tim Puskurbuk terlibat diskusi dengan pengelola dan kepala sekolah SD Kupu-kupu (Foto: Heru Setyono)

mengembangkan tema-tema tersebut sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dalam pembelajaran selalu diikuti dengan praktik langsung, karena siswa perlu belajar proses”, ungkap Meira Sartika, selaku Kepala Sekolah.

Sebagai sekolah yang diperuntukkan bagi semua anak tanpa memandang latar belakang dan tingkat kemampuannya, SD Kupu-Kupu telah menerapkan pola pembelajaran inklusif sejak tahun 2005. Sesuai dengan misi sekolah inklusif, proses pembelajaran diawali dengan observasi langsung ke anak wawancara dengan orangtua, dan didukung oleh data hasil analisis kemampuan akademik, sosial, dan emosional dari psikolog.

Semua data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar bagi pihak sekolah dalam menciptakan layanan yang sesuai sehingga semua anak dapat terlayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembelajaran yang menggunakan sistem *active learning* serta lingkungan sekolah yang hijau dan asri, banyak pohon, rumput, tidak bising suara kendaraan menimbulkan kesan tersendiri yang menunjukkan bahwa sekolah ini memang sesuai ramah kepada anak.

SEKOLAH LAZUARDI

Senada dengan SD Kupu-Kupu, Sekolah Lazuardi mencoba menyatukan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang biasa, mereka menyatu dalam belajar dan bermain.

Sebagai sekolah inklusif yang berdiri sejak tahun 2000 di atas lahan seluas hampir 3 hektar di kawasan Depok ini, menempatkan anak-anak biasa dengan yang berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan yang sangat khusus disediakan terapis. Oleh karena itu, di setiap kelas (I sampai dengan VI)

terdapat dua guru dan seorang terapis. Semuanya bertanggung jawab untuk memberi perlakuan yang sesuai kepada anak-anak sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik, tujuannya yaitu menjadikan mereka bisa hidup mandiri, bergaul, dan diterima masyarakat.



Salah satu sudut halaman SD Lazuardi (Foto: Heru Setyono)

Sekolah yang menggunakan dua bahasa dan memadupadankan kurikulum nasional dengan kurikulum berbagai negara ini bisa disebut sebagai sekolah elit namun tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi murid di sini. Tidak ada tes masuk dan sekolah ini mengacu kepada prinsip *first in first serve* sesuai dengan paradigma yang diyakini bahwa semua anak itu cerdas dan sudah menjadi tugas sekolah untuk mengembangkan potensi mereka. Sekolah Lazuardi juga melakukan observasi agar pihak sekolah memiliki informasi yang cukup tentang setiap siswa, sehingga sekolah dapat

memberikan pelayanan maksimal kepada setiap anak, tanpa kecuali.

Dalam rangka menciptakan pelayanan maksimal kepada setiap anak, pada setiap awal tahun pelajaran semua guru berkumpul membahas tentang tema, pendekatan pembelajaran, dan Kompetensi Dasar secara paralel. Ketika membahas satu Kompetensi Dasar guru harus mengetahui dulu cakupannya termasuk mengkaji indikator yang dikembangkan oleh guru. "Cara ini cukup efektif untuk membangun kesepakatan dan kolaborasi antar guru. Kedalaman dan perluasan Kompetensi Dasar perlu dibicarakan sebelum dibelajarkan", ujar Kepala Sekolah.

SEKOLAH CIKAL

Sekolah Cikal memberlakukan kurikulum sendiri yang dikembangkan dengan meramu antara kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Pembelajaran di sekolah ini menekankan pada pendekatan individual. Rasio siswa dan guru cukup membuka peluang pada guru untuk memberi perhatian lebih kepada masing-masing siswanya. Tiap-tiap anak memiliki program edukasinya sendiri. Alasannya sekolah ini bukan hanya bertujuan akademis, tetapi juga kematangan emosional, sosial, dan spiritual.

Sekolah Cikal betul-betul memantau perkembangan siswa agar mereka dapat meraih hasil maksimal. Agar layanan pembelajaran kepada setiap anak berjalan maksimal, semua guru berdiskusi dan membagi tugas sebelum pembelajaran dimulai. Forum diskusi ini membahas mulai dari cakupan materi pembelajaran, strategi pembelajaran sampai dengan bagaimana pelaksanaan penilaiannya.



Salah satu guru dalam tim pengajar mendampingi anak yang belum memahami materi yang diajarkan (Foto: Heru Setyono)

Tentu saja masing-masing guru tidak melaksanakan secara kaku dalam pembagian tugas, tetapi saling membantu, saling melengkapi sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan kalau ada anak seperti yang belum memahami materi yang diajarkan,

guru akan mendampingi sampai anak paham.

Kendalanya terkadang ada materi yang tidak mudah dipahami anak, karena terbatasnya waktu dan juga terkadang kendala hari libur, hal ini disiasati dengan mengulang materi tersebut diajarkan dengan waktu yang nyebrang di semester berikutnya. Di sekolah Cikal ini sesuai pengamatan tim Puskurbuk, ketika guru akan memulai kegiatan pembelajaran selalu diawali dengan *team teaching* dan berdiskusi. Demikian juga ketika berakhir pembelajaran, guru-guru tersebut melakukan evaluasi.



Suasana pembelajaran di SDN 03 Pagi Menteng Jakarta Pusat (Foto: Heru Setyono)

SDN 03 PAGI MENTENG

Pembelajaran di SDN 03 Pagi Menteng juga memanfaatkan buku-buku lainnya yang ada di perpustakaan, internet, dan sarana yang ada di lingkungan sekolah, selain menggunakan buku teks. Hal ini bertujuan untuk membiasakan anak untuk gemar menggunakan perpustakaan. Sekolah ini menggunakan pembelajaran tematik integratif di semua kelas. Proses tersebut dilaksanakan melalui *team teaching*. Untuk menjaga keefektifan proses pembelajaran yang demikian, setiap awal tahun ajaran baru, semua guru berkumpul membahas dan menganalisis Kompetensi Dasar dan membuat perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Permasalahan yang terjadi ketika membuat perencanaan diatasi melalui kerja kolaboratif. Permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pembelajaran tematik integratif ini adalah ketika pembelajaran salah satu tema belum dikuasai siswa, tiba-tiba waktu pembelajaran sudah harus berakhir, namun sejauh ini semua kendala dapat diatasi dengan baik.

Inovasi PUSKURBUK: BUKU TEKS PELAJARAN MASA DEPAN

Penulis: Oos M. Anwas

Era revolusi industri 4.0 telah memengaruhi hampir semua pola hidup dan pola pikir manusia. Perubahan tersebut sangat begitu cepat. Misalnya, bisnis dan belanja daring kini berkembang sangat pesat. Akibatnya tempat perbelanjaan konvensional, seperti mal, pasar modern, supermarket, dan tempat sejenisnya tidak sedikit yang gulung tikar. Di sisi lain, profesi baru yang semula kurang diminati menjadi favorit, misalnya transportasi daring. Perkembangan zaman ini akan terus berubah seiring tuntutan peradaban.



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki keragaman bahasa daerah, agama, ras, suku, serta budaya dan kearifan lokal. Indonesia juga memiliki berbagai sumber kekayaan alam di darat, laut, dan udara. Begitu pula, Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman flora dan fauna, bahan tambang, serta kondisi geografis. Semua keragaman yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan tantangan dan peluang untuk mampu menyejahterahkan bangsanya.

Cepatnya perubahan zaman dan beragamnya kondisi masyarakat Indonesia berdampak secara langsung terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan dituntut mampu menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi untuk hidup secara mandiri, kreatif, dan produktif. Untuk mewujudkan hal itu, dunia pendidikan harus mampu mengondisikan pembelajaran yang membiasakan

setiap individu peserta didik untuk mampu berpikir kritis, *problem solving*, komunikatif, kolaboratif, dan *adaptable* dengan perubahan dan keragaman kondisi. Di sisi lain, peserta didik juga dituntut mengenali terhadap diri dan lingkungan, serta negara dan bangsanya sehingga mampu berkembang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan budayanya.

Untuk menyiapkan pendidikan sesuai tuntutan tersebut, peran buku teks pelajaran sangat strategis. Realitas kini di sekolah, bahwa buku teks pelajaran menjadi sumber belajar utama. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyiapkan buku teks pelajaran (utama) yang bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi (UU No. 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan). Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Balitbang Kemendikbud berperan dalam mengembangkan

Buku Teks Pelajaran (BTP) masa depan yang bermutu.

Tahapan pengembangan buku mulai dilakukan dengan pembentukan Tim Pengembang yang terdiri dari pakar substansi/materi, pakar pendidikan, psikolog, guru, pelaku perbukuan, serta berbagai pihak lainnya. Kajian yang dilakukan oleh Tim Pengembang didasarkan pada tuntutan perkembangan zaman dan teknologi, revolusi industri 4.0, *Sustainable Development Goals* (SDGs), menyongsong era ekonomi kreatif, orientasi pembangunan SDM, serta aspek kreatif dan ramah lingkungan.

Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik dan keragaman yang sangat besar.



Karakteristik dan keragaman tersebut perlu diakomodir dalam buku teks pelajaran. Atas dasar pertimbangan tersebut, Tim Pengembang berhasil merumuskan 13 keunggulan BTP masa depan, di antaranya adalah menunjukkan nilai-nilai teoritis dan praktis dari kurikulum yang berlaku, menanamkan nilai budaya dan karakter, pengembangan kecakapan abad 21, menyesuaikan dengan perubahan dan keragaman, membiasakan berpikir kritis, merangsang anak untuk senang belajar, serta mencegah unsur kekerasan, SARA dan pornografi. Aspek keunggulan tersebut menjadi indikator dan pedoman dalam menyusun BTP masa depan.

Merealisasikan indikator keunggulan BTP masa depan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi calon penulis. Tahapan seleksi penulis dilakukan

Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik dan keragaman yang sangat besar. Karakteristik dan keragaman tersebut perlu diakomodir dalam buku teks pelajaran.

dengan mengundang para guru, dosen, praktisi pendidikan, praktisi perbukuan serta pihak-pihak lainnya yang terkait. Penjaringan calon penulis dilakukan melalui laman <http://seleksipenulis.kemdikbud.go.id>. Seleksi calon penulis kini sedang memasuki tahapan lanjutan. Tujuan seleksi adalah mendapatkan calon penulis BTP masa depan yang memiliki komitmen dan kompetensi yang berkualitas.

Langkah selanjutnya, adalah proses penulisan buku. Pada proses ini dilakukan oleh penulis terpilih hasil seleksi tersebut. Selama proses penulisan, dilakukan pendampingan oleh Tim Pengembang, ahli materi, praktisi pembelajaran, dan praktisi perbukuan. Selama proses ini kegiatan *review* dan revisi terus dilakukan. Langkah berikutnya akan dilakukan *layout* dan ilustrasi dan media, uji coba serta finalisasi. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan BTP masa depan sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan oleh Tim Pengembang.

BTP masa depan ini akan dikembangkan dalam dua format yaitu konvensional dan digital. Format konvensional dalam bentuk buku cetak. Format digital dikembangkan dalam konten berbasis teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi. Penyiapan konten buku digital ini memerlukan kolaborasi antara Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta unit terkait lainnya. Buku digital ini selanjutnya dapat digunakan baik melalui *online*, *offline* ataupun dalam bentuk campuran (*mix*). Adapun teknologi yang dikembangkan mengikuti perkembangan serta mempertimbangkan kemudahan penggunaannya dalam keragaman wilayah Indonesia.

Pengembangan BTP masa depan ini merupakan salah satu program inovasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Inovasi buku ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan zaman sekarang, dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan inovasi ini tentu saja bergantung pada upaya kerja keras dan komitmen semua pihak yang terlibat.

MENJAWAB TANTANGAN KECAKAPAN ABAD 21: MENGUJI HAL YANG LEBIH DARI PENGETAHUAN RUTIN

Penulis: Rahmawati

Pernahkah Anda mendapat kuis tentang cara menyeberangkan musang, ayam, dan jagung menggunakan sampan? Jika belum, artikel ini akan diawali oleh kuis tersebut.

Seorang petani berupaya menyeberangi sungai dengan rakit. Petani tersebut membawa seekor musang, seekor ayam dan sekantong jagung. Permasalahannya adalah, petani hanya dapat membawa salah satu dari ketiganya ketika menyeberangi sungai. Bagaimanakah cara petani tersebut dapat menyeberangkan ketiganya tanpa ada satupun yang dimakan oleh hewan lainnya?



Pengetahuan rutin dari kuis tersebut adalah jenis makanan dari hewan: bahwa ayam memakan jagung serta musang memangsa ayam. Namun kuis tersebut menguji keterampilan yang lebih dari pengetahuan rutin. Kita ditantang untuk mencari solusi cara menyeberangkan ketiganya tanpa pernah membiarkan ayam bersama jagung ataupun musang bersama ayam. Kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk dapat menyelesaikan kuis tersebut.

Contoh kuis di atas adalah hal yang umum ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Pengetahuan rutin membuat kita memahami konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Namun kemampuan berpikir kritis diperlukan oleh kita ketika memasuki pusat perbelanjaan dan menawarkan potongan harga dengan skema yang beragam: beli dua gratis 1, beli barang kedua diskon 50%, diskon 30%+20%, *cashback* Rp 100.000,00. Skema potongan harga manakah yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan kita?

Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kompetensi abad 21 yang lazim dikenal dengan jargon 4C : *critical thinking, creativity,*

collaboration, dan communication (World Economic Forum- *New Vision for Education* 2015). Kemampuan tersebut menjadi *urgens* untuk menyiapkan anak-anak kita siap menghadapi perubahan cepat yang terjadi pada dunia kerja, dunia industri serta kehidupan sosial budaya akibat pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi internet. Secara gamblang Direktur Pendidikan OECD, Andreas Schleicher, mengatakan, "*the modern global economy doesn't pay you for what you know, because the internet knows everything. The world economy pays you for what you can do with what you know*". Mengetahui cara menghitung persentase tidak menjadi garansi apakah seseorang mampu memutuskan memilih skema potongan harga yang tepat untuk dirinya. Pengetahuan tentang ayam memakan jagung serta musang memangsa ayam bukanlah syarat cukup untuk mampu menyelesaikan kuis menyeberangkan ketiganya pada ilustrasi di bagian awal.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang, menyikapi tantangan menyiapkan siswa Indonesia cakap berpikir kritis dengan mengujikan 10% soal yang lebih dari sekedar pengetahuan rutin di ujian nasional (UN). Sejak tahun 2014, soal-soal yang kemudian dikenal sebagai soal HOTS (*Higher Order Thinking Skills*) tersebut sudah ada, meskipun hanya 2 butir soal dan tidak di seluruh mata pelajaran. UN matematika SMP tahun 2014 sempat viral di media karena adanya soal dari studi

Perhatikan gambar berikut!



Dua buah gelas A dan B tersusun seperti gambar I sulit untuk dipisahkan. Kemudian susunan gelas A dan B dimasukkan ke dalam air panas seperti gambar II. ternyata kedua gelas tersebut menjadi mudah dipisahkan. Hal ini terjadi karena ...

- gelas A memuai lebih dulu daripada gelas B
- gelas B memuai lebih dulu daripada gelas A
- gelas A menyusut, gelas B memuai
- gelas A memuai, gelas B menyusut

Gambar 2. Soal USM 2014 bidang studi IPA

internasional PISA (*Programme for International Students Assessment*). Maksud penggunaan soal yang sudah dikembangkan oleh seluruh negara

Sebuah pabrik memproduksi ban sepeda melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin A untuk mengolah karet mentah menjadi karet siap cetak. Tahap kedua menggunakan mesin B untuk mengolah karet siap cetak menjadi ban. Misalkan x menyatakan jumlah karet mentah dalam satuan kg dan y menyatakan jumlah bahan siap cetak dalam satuan m^2 . Pada tahap pertama, banyak bahan siap cetak dihasilkan mengikuti fungsi $y = f(x) = 5x - 7$. Pada tahap kedua, jumlah ban yang dihasilkan mengikuti fungsi $g(y) = 7y + 3$. Jika satu buah ban sepeda seharga Rp50.000 dan terdapat 100 kg karet mentah, pendapatan pabrik tersebut adalah

- A. Rp169.500.000,00
 B. Rp170.550.000,00
 C. Rp170.700.000,00
 D. Rp172.550.000,00
 E. Rp172.700.000,00

Kunci: E

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} y &= 7x + 3 \\ 7(5x - 7) + 3 \\ &= 35x - 49 + 3 \\ y &= 35x - 46 = 3454 \rightarrow \text{tersedia 100 karet} \\ y &= 3454 \times \text{Rp } 50.000 = 172.700.000,00 \end{aligned}$$

Gambar 3
 Contoh soal UN
 2018 matematika
 jenjang SMA
 jurusan IPA

peserta PISA tersebut adalah sebagai pemantik semangat meningkatkan kompetensi berpikir kritis. Pengenalan soal sejenis juga dilakukan di jenjang sekolah dasar. Soal Ujian Sekolah Madrasah 2014 bidang studi IPA merupakan soal pada level aplikasi (gambar 2). Pengetahuan rutin tentang konveksi, radiasi, konduksi serta dampaknya pada material sudah diketahui anak berdasarkan standar kurikulum yang berlaku. Soal pada gambar 2 diharapkan siswa untuk mampu menalar, proses apakah yang terjadi sehingga gelas tersebut mudah dipisahkan setelah dimasukkan ke air panas.

Wacana soal-soal yang mengukur tidak sekedar pengetahuan rutin kemudian diimplementasikan menjadi *strategi capacity building* guru-guru dalam menyusun soal. Direktorat pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 2015 melakukan pelatihan penulisan soal HOTS kepada guru-guru. Modul guru yang dikembangkan oleh PPPPTK juga memasukkan bagian khusus tentang pembahasan soal pada level berpikir yang lebih tinggi. Puspendik juga menyusun bahan belajar secara daring untuk penulisan soal di <https://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id>. Secara internal, Puspendik melakukan pengembangan diri dengan mendatangkan pakar konsultan dari lembaga asesmen asing untuk memperkuat konsep HOTS dan meningkatkan kemampuan menyusun soal jenis tersebut. Sejak tahun 2015, soal HOTS telah menjadi bagian dari soal ujian nasional. Konferensi pers hasil UN tahun 2016, 2017 serta 2018 selalu menampilkan contoh soal tersebut sebagai upaya menjelaskan ke publik, kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa selain pengetahuan rutin.

Hal yang sangat viral pada UN 2018 adalah soal matematika yang sangat sulit. Bagaimanakah contoh soal yang sulit tersebut? Soal pada gambar 3 merupakan soal yang hanya mampu dijawab benar oleh 8 % siswa. Termasuk ke dalam soal yang lebih dari pengetahuan rutin. Soal tersebut menguji materi aljabar topik

komposisi 2 fungsi. Soal sejenis dapat ditemukan di buku teks baik yang berbasis Kurikulum 2013 ataupun KTSP (gambar 4). Jika dicermati, soal tersebut meskipun bukan soal pengetahuan rutin, termasuk ke dalam level aplikasi, belumlah penalaran. Kesetaraan kompleksitas soal UN dengan contoh soal pada buku teks, menimbulkan satu pertanyaan besar. Jika siswa gagal pada soal UN, apakah siswa tersebut berhasil menjawab dengan baik soal-soal pada buku teks selama proses pembelajaran?

Perubahan telah dan sedang terjadi. Perlu kita cermati bahwa jenis pekerjaan baru banyak bermunculan, begitu pula dengan jenis

Masalah-3.3

Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin I yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua dengan menggunakan mesin II yang menghasilkan kertas. Dalam produksinya mesin I menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi $f(x) = 0,9x - 1$ dan mesin II mengikuti fungsi $g(x) = 0,02x^2 - 2,5x$, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? (kertas dalam satuan ton).

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 Matematika/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Edisi Revisi.
 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
 viii, 200 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1
 ISBN 978-602-282-095-6 (jilid lengkap)
 ISBN 978-602-282-097-0 (jilid 2a)

Gambar 4. Contoh soal tentang komposisi 2 fungsi pada buku teks matematika

pekerjaan lama menjadi hilang atau tergantikan. Penjaga pintu tol beralih menjadi gerbang tol otomatis, penjual toko beralih menjadi aplikasi toko daring. Kita tidak dapat menutup mata untuk menyiapkan siswa kita siap menghadapi perubahan. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis harus dimulai dari setiap kelas. Penilaian bergerak tidak hanya mengukur pengetahuan yang telah rutin.

CATATAN PELAKSANAAN UNBK PAKET B DAN PAKET C DI LAPAS CIPINANG DAN SALEMBA JAKARTA

INTEGRITAS UJIAN MERAMBAH SAMPAI KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penulis: Eviana Hikamudin

Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang telah memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti UN. Tidak hanya peserta didik pada satuan pendidikan formal (SMP/MTs, SMA/MA, SMK), namun peserta didik yang berada pada satuan pendidikan non-formal/ pendidikan kesetaraan (Paket A dan Paket B) juga berhak mengikuti UN sebagai tahap akhir untuk menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.



Suasana UNBK Paket C Tahun 2018 di Lapas Kelas IIA Salemba Jakpus (sumber: Puspendik 2018)

Moda pelaksanaan UN yang saat ini diselenggarakan terdiri dari dua yaitu Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sejak dirintisnya mulai tahun 2015, secara bertahap moda pelaksanaan UNBK meningkat secara signifikan selama 4 tahun terakhir, bahkan sejak tahun 2017 Kemendikbud sudah mendorong agar pelaksanaan UNBK tidak hanya pada satuan pendidikan formal tetapi juga dapat dilaksanakan di satuan pendidikan non-formal. Dengan adanya kebijakan berbagi sumberdaya (*resource sharing*) dalam UNBK, kesempatan satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan UNBK semakin besar. Hal ini dapat dipahami karena satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan sarana komputer dapat menumpang untuk melaksanakan UNBK pada satuan pendidikan lain yang sarana komputernya sudah memadai. Ternyata kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap kesempatan satuan pendidikan non-formal (PKBM) untuk dapat melaksanakan UNBK walaupun belum memiliki sarana komputer yang memadai dengan cara menumpang pada satuan pendidikan formal yang ada di sekitarnya. Fakta lainnya menunjukkan

bahwa ternyata ada beberapa PKBM yang telah memiliki sarana komputer yang memadai sehingga mereka dapat melaksanakan UNBK secara mandiri.

Hal penting yang menjadi pertimbangan mengapa moda pelaksanaan UNBK sebagai prioritas dalam pelaksanaan UN adalah nilai integritasnya yang tinggi. Dalam pelaksanaan UNBK, setiap peserta ujian akan mendapatkan materi ujian yang sesuai dengan kisi-kisi dan paket soal yang diterima akan berbeda-beda karena setiap butir yang diujikan telah disusun secara acak (*random*) untuk setiap peserta ujian, sehingga akan muncul paket soal dengan variasi yang sangat banyak. Selain itu paket soal yang dikirimkan dari *server* pusat ke *server* lokal melalui sinkronisasi sebelumnya sudah diamankan dengan cara dienkripsi. Dengan demikian dalam pelaksanaan UNBK peluang untuk terjadinya kebocoran soal atau kunci jawaban sangatlah kecil. Pelaksanaan UNBK pada jenjang Paket B dan Paket C secara langsung akan menjadikan ujian yang berintegritas dan meningkatkan mutu ujian paket itu sendiri karena hasilnya relatif akan dapat



Foto1: Suasana UNBK Paket C Tahun 2018 di Lapas Cipinang Jaktim (sumber: Puspendik 2018)

menggambarkan kemampuan peserta ujian yang sebenarnya. Secara tidak langsung pelaksanaan UNBK pada jenjang Paket B dan Paket C akan meningkatkan marwah pendidikan kesetaraan karena pelaksanaannya diyakini lebih jujur dan hasilnya lebih obyektif.

Dalam pelaksanaan UN tahun 2018 berdasarkan hasil pendataan Puspendik tercatat ada 4.865 PKBM yang melaksanakan UNBK Paket C dengan melibatkan warga belajar sebanyak 206.969 orang. Untuk PKBM yang melaksanakan UNBK Paket B tercatat sebanyak 5.757 yang melibatkan warga belajar sebanyak 114.021 orang. Berdasarkan data tersebut berarti persentase PKBM yang melaksanakan UNBK Paket C sudah mencapai 96% baik ditinjau dari jumlah PKBM maupun jumlah peserta ujian. Tidak berbeda jauh dengan data tersebut, persentase PKBM yang sudah melaksanakan UNBK Paket B mencapai 95%, sedangkan peserta ujian Paket B yang sudah melaksanakan UNBK sebesar 94%. Fakta ini menunjukkan bahwa terlihat ada geliat yang masif dari satuan pendidikan non-formal (kesetaraan) untuk dapat melaksanakan ujian secara berintegritas dengan melaksanakan UNBK.

Sebuah fenomena menarik yang terjadi dalam pelaksanaan UNBK tahun 2018 dan perlu untuk diberikan apresiasi adalah UNBK dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bagi peserta UN warga binaan Lapas. Pada tahun ini tercatat ada 3 PKBM yang melaksanakan UNBK di dalam penjara (lapas) yaitu PKBM Lapas Kelas II A Salemba Jakarta Pusat, PKBM Warga Mandiri Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan PKBM Pandu Pelajar Mandiri Lapas Cipinang Jakarta Timur. Untuk pelaksanaan UNBK pada kedua Lapas di atas dilaksanakan secara mandiri. Peserta UNBK di PKBM Lapas Salemba masing-masing berjumlah 14 orang untuk Paket B dan 19 orang untuk Paket C. Pelaksanaan UNBK di Lapas Cipinang, sarana komputernya difasilitasi oleh PKBM CKI (Cipta Karya Intelektual) Jakarta. Jumlah peserta ujian di

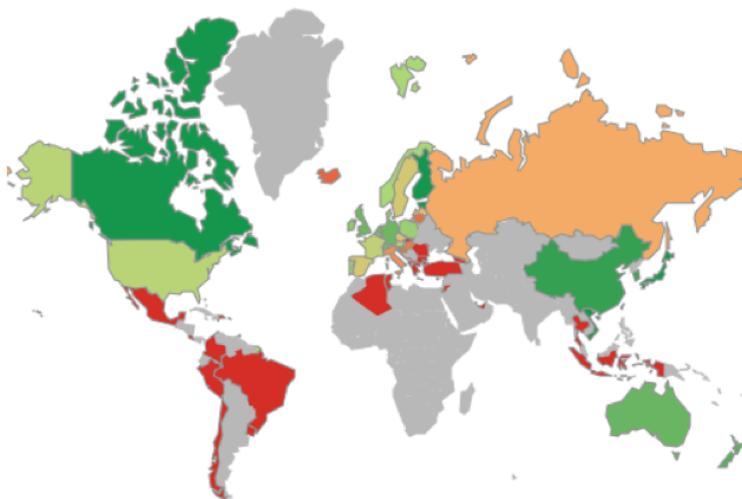
PKBM Warga Mandiri Cipinang masing-masing 4 orang untuk Paket B dan 21 orang untuk Paket C. Selanjutnya jumlah peserta ujian di PKBM Pandu Pelajar Mandiri Cipinang masing-masing 20 orang untuk Paket B dan 26 orang untuk Paket C, demikian keterangan yang disampaikan oleh Betty selaku pengelola PKBM CKI Jakarta yang memfasilitasi sarana UNBK untuk dua PKBM di Lapas Cipinang Jaktim.

Pada saat terpisah, Fikri salah seorang pengelola PKBM Pandu Pelajar Mandiri Lapas Cipinang, menyebutkan bahwa peserta UN warga binaan yang mengikuti UNBK di Lapas Cipinang Jaktim tahun ini terdiri dari warga binaan Lapas yang memiliki kasus kriminal, narkoba dan beberapa anggota keluarga petugas Lapas yang putus sekolah. Sedangkan para tutor yang membina pembelajaran di PKBM adalah para petugas Lapas dan warga binaan lulusan S1/S2 yang telah dibekali pelatihan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pelaksanaan UNBK tahun 2018 yang merambah hingga ke Lapas yang disertai dengan semangat para warga binaan Lapas untuk melaksanakan UNBK, menunjukkan adanya upaya membangun integritas ujian di manapun adanya. Hendaknya hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pengelola satuan pendidikan baik formal maupun non-formal untuk terus meningkatkan integritas dan mutu pelaksanaan ujian. Dengan memahami bahwa ujian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan, maka seiring dengan meningkatnya integritas dan mutu pelaksanaan ujian diharapkan setahap demi setahap mutu pendidikan nasional dapat ditingkatkan. Perlu diakui bahwa hasil ujian itu penting, tetap jujur dalam melaksanakan ujian adalah hal yang sangat utama. Semoga integritas yang tumbuh di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah tanah air Indonesia yang kita cintai bersama.

STUDI UTAMA PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENTS ASSESSMENT (PISA) 2018 DI INDONESIA: LEBIH DARI SEKEDAR MELAKUKAN TES

Penulis: Rahmawati



Cakupan wilayah 72 negara peserta PISA 2015

Indonesia sejak tahun 2001 telah berpartisipasi pada studi internasional PISA. PISA adalah suatu survei yang diselenggarakan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Survei internasional tiga tahunan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia dengan menguji keterampilan dan pengetahuan siswa berusia 15 tahun (www.oecd.org/pisa). Desain awal tes PISA adalah mengujikan literasi membaca, literasi IPA, serta literasi matematika. Selain mengukur capaian siswa, PISA juga menggali informasi mengenai siswa dan sekolah melalui kuesioner.

Sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2000, jumlah negara peserta studi PISA selalu bertambah. Tercatat 78 negara mengikuti studi PISA tahun 2018. Tidak hanya jumlah peserta yang bertambah, cakupan keterampilan dan pengetahuan yang diujikan PISA juga semakin luas dan beragam sesuai perkembangan zaman. PISA 2018 menawarkan opsi tes penyelesaian masalah secara kolaboratif, literasi finansial, serta kompetensi global. Sedangkan kuesioner yang digunakan untuk menjangkau informasi sistem pendidikan semakin komprehensif dengan opsi kuesioner guru, orangtua, literasi finansial, familiaritas dengan teknologi informasi komputer, serta kuesioner tentang rencana pendidikan dan karir. PISA juga memberikan opsi bagi setiap negara peserta untuk menyelenggarakan tes dalam format ujian berbasis komputer atau ujian berbasis kertas dan pensil.

Indonesia pertama kali di PISA 2018 melakukan ujian berbasis komputer, menyelenggarakan ujian

literasi finansial serta kompetensi global, juga melakukan *oversample* provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pilihan tersebut berkonsekuensi terhadap sejumlah kebaruan yang harus dikreasikan oleh Indonesia. Mengikuti PISA 2018 menjadi lebih dari sekedar melakukan tes.

Kebaruan berbasis komputer. Indonesia sebenarnya sudah memiliki pengalaman pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Tahun 2018 lebih dari 59 ribu satuan pendidikan melaksanakan Ujian nasional berbasis komputer. Namun, PISA berbasis komputer berbeda dengan UNBK. Perbedaan yang paling mencolok adalah format stimulus soal dan soal PISA memang didesain secara spesifik untuk ujian berbasis komputer. Beberapa stimulus soal literasi IPA berupa simulasi percobaan (<http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S623-RunningInHotWeather&lang=eng-ZZZ>). Contoh pada soal PISA yang sudah dipublikasikan;

peserta ujian dapat mencoba pengaruh dari suhu, kelembapan udara, serta asupan air terhadap jumlah keringat, kerentanan tubuh terkena dehidrasi, dan serangan panas. Baik suhu, kelembapan udara, serta asupan air ditampilkan dalam bentuk variabel yang nilainya dapat dipilih oleh peserta ujian. Dampak dari pilihan tersebut kemudian disimulasikan oleh komputer berupa jumlah volume keringat, naiknya suhu tubuh dan persentase cairan tubuh yang hilang. Model simulasi percobaan IPA tersebut masih baru bagi sebagian besar siswa, sehingga keterampilan penggunaan komputer juga diperlukan untuk menjawab soal.

Kebaruan yang kedua: mengikuti tes literasi keuangan dan kompetensi global. Mata pelajaran IPS dan PPKn telah menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa Indonesia. Namun kecakapan hidup pada literasi keuangan dan kompetensi global yang diujikan di PISA berbeda. Contoh soal literasi keuangan adalah bagaimana siswa memahami nilai uang melalui pilihan pembelian: membeli tomat 1 peti berisi 20 kg dengan harga Rp 100.000,00 atau membeli tomat 1 kg dengan harga Rp 7.500,00. Siswa diminta menentukan pada kondisi bagaimanakah membeli tomat 1 peti merugikan secara finansial? Sederhana, tetapi tidak lazim untuk siswa Indonesia. Begitu pula dengan tes kompetensi global. Sikap cinta tanah air kita pelajari sedari pendidikan usia dini. Tetapi pada konteks global siswa diminta untuk merefleksikan: diterima sebagai warga pengungsi dan menjuarai festival olahraga, untuk negara manakah medali yang diraih tersebut diberikan?

Kebaruan yang ketiga: *oversample* DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sejak tahun 2001 Indonesia selalu mengikuti PISA sebagai suatu negara. Berbeda dengan Tiongkok yang hanya ikut sebagai Shanghai. Tahun 2018, Indonesia mencoba melakukan *oversample* dua provinsi, sehingga hasil PISA 2018 dapat diagregat sebagai negara, sekaligus mengetahui DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dibandingkan dengan negara peserta PISA lainnya. Tahun 2018 dipilih 400 sekolah sampel PISA: 60 sekolah di DKI Jakarta, 58 sekolah di DI Yogyakarta, dan 282 sekolah tersebar di 30 provinsi lainnya. Di setiap sekolah akan dipilih sampel siswa maksimal 50 orang. Semua siswa sampel dipilih berdasarkan kriteria tahun lahir 2002. Sekolah tersebut terdiri dari sekolah/madrasah, negeri/swasta, *enrollment* besar/ sedang/kecil, baik di kota maupun di desa. Sekolah yang terpilih mencerminkan varian sekolah yang ada di Indonesia.

Sumber Foto: Pusat Penilaian Pendidikan



Studi Utama PISA di MTs Negeri 6 Bantul, Yogyakarta



Studi Utama PISA di SMP Terbuka Wawotobi, Sulawesi Tenggara

Kebaruan tersebut menjadi sarana Indonesia untuk belajar. Balitbang bekerja sama dengan Dikdasmen, Otoritas Jasa Keuangan, Kemenag, Dinas Provinsi memetakan hal-hal yang diperlukan agar tes PISA dapat terselenggara dengan lancar. Sekolah-sekolah yang kekurangan infrastruktur didukung dengan piranti komputer: baik berupa hibah, pinjaman, ataupun menumpang. Aplikasi latihan yang memuat beragam format soal disusun agar siswa terbiasa dengan fitur ujian berbasis komputer model PISA. Hal terpenting lainnya adalah mengupas *framework* tes PISA, sehingga terpetakan gap antara kompetensi yang berlaku secara nasional dengan standar yang ditetapkan secara Internasional.

Lebih dari sekedar melakukan tes, 400 sekolah sampel PISA 2018 yang telah melakukan ujian PISA pada tanggal 19 April sampai dengan 9 Mei 2018, terinspirasi dan termotivasi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.

Peningkatan Daya Saing Organisasi melalui Peran PENELITI, JURNAL ILMIAH, DAN KONFERENSI

Penulis: Bagus Hary Prakoso

Dalam membangun daya saing organisasi, dapat digunakan kerangka yang menjelaskan bagaimana menciptakan nilai (*value creation*) sebagai suatu keunggulan kompetitif dari organisasi (Porter, 1998). Selanjutnya untuk membangun daya saing diperlukan syarat penciptaan dan asimilasi pengetahuan sebagai ujung tombang inovasi (Satria, 2002).

Berdasarkan dua konsep tersebut, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) sebagai organisasi penelitian dan pengembangan berupaya merespon dengan melakukan langkah terintegrasi (*integrated steps*) sesuai dengan program yang dimiliki. Langkah terintegrasi tersebut adalah dengan melakukan sinergi antara peran peneliti sebagai organisasi *think-tank*, jurnal ilmiah sebagai instrumen untuk *knowledge and policy creation*, dan konferensi sebagai instrumen untuk membangun *stakeholder engagement*, legitimasi, dan kredibilitas. Melalui sinergi, akan tercipta adanya akselerasi dan motivasi terkait proses dan *output* yang idealnya dapat mendukung pencapaian visi organisasi.

Pemikiran tersebut kiranya sesuai dengan konsep Porter (1998), untuk melakukan inovasi dan *value creation* dibutuhkan peneliti (*human resources*), yang didukung oleh instrumen penerbitan jurnal ilmiah dan penyelenggaraan konferensi nasional dan internasional (*distinctive competencies and capabilities*). Merespon hal tersebut, mulai 2018 tepatnya pada Juni 2018, Puspendik akan meluncurkan Jurnal Ilmiah yang disebut *Indonesia Journal of Educational Assessment* (IJEA). Penamaan tersebut dipilih karena Puspendik merupakan lembaga nasional satu-satunya di Indonesia yang mengembangkan penilaian pendidikan (*educational assessment*) dengan visi menjadi lembaga nasional yang profesional dan berstandar internasional.

Langkah konkrit kedua, pada Juni 2018, Puspendik akan menyelenggarakan konferensi pertama *National Conference on Educational Assessment and Policy* (NCEAP). Dalam upaya membangun daya saing dalam konteks sumberdaya dan *output*, peserta konferensi berasal dari internal Puspendik dan dari luar instansi Puspendik. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan timbul adanya persaingan peningkatan mutu hasil penelitian dan kapasitas peneliti. Selain itu, *output* kegiatan ini juga memiliki beberapa *value creation* yang jauh lebih baik dibandingkan kegiatan seminar sebelumnya seperti angka kredit, terindeks global, rekomendasi ke jurnal, serta insentif lainnya.

NCEAP 2018
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN

THE 1st NATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL ASSESSMENT AND POLICY

Tema: Membangun Daya Saing dan Mutu Pendidikan Melalui Program Penilaian dan Evaluasi Pendidikan

Keynote Speaker:
Bahru Hayat, Ph.D.
Fakultas Psikologi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketua Umum Himpunan
Evaluasi Pendidikan Indonesia

Keynote Speaker:
Linda Marais, Ph.D.
Senior Research Fellow
Personnel Psychometrics Laboratory
The University of Western Australia

Rabu, 27 Juni 2018, Pukul 08.00 s.d. 17.00
Graha Utama Gedung A Lt. 3 Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta

Call for Paper & Peserta

- Fasilitas Umum:** Seminar Kit, Lunch & Snacks, dan Sertifikat
- Fasilitas Pemakalah:** Prosiding Nasional ber-ISBN, Rekomendasi ke Jurnal IJEA dan Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan serta reward lainnya.
- Penerimaan Makalah:** s.d. 15 Juni 2018
- Penerimaan Lulus Seleksi:** 17 Juni 2018 (25 pemakalah)
- Peserta Non Pemakalah:** Terbatas 150 orang
- Pengiriman Naskah:** ijeajournal@kemdikbud.go.id
- Scope:** Hasil Penelitian di bidang Penilaian dan Evaluasi Pendidikan, dan disiplin terkait Kebijakan, Manajemen, Psikologi, IT, dan lainnya

Indexed by Crossref, Google Scholar, ERIC-INDONESIA, and others. <http://ijeajournal.kemdikbud.go.id/>

Informasi dan Pendaftaran: 081 29965733 (Lili Holududin)

Pemikiran dan langkah-langkah di atas, kiranya sesuai apa dirumuskan oleh Linda Moris dalam Marquardt dan Reynolds (1994) bahwa untuk menjadi inovatif dan berdaya saing, organisasi seperti Puspendik yang berada di Badan Penelitian dan Pengembangan perlu secara jelas dan berkomitmen terhadap visi (*visioner*), berpikir sistem (*integrated*), transformatif, kreatif, dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sumberdaya manusia (terutama peneliti).

Referensi:

- Marquardt, Michael, J. and Reynolds, Angus (1994). *The Global Learning Organisation*. New York: Irwin.
- Porter, Michael, E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
- Satria, Riri. (2002). *Kapasitas Belajar suatu Bangsa*. Sinar Harapan 19 Januari 2002.

PENELITIAN DIASPORA PENUTUR AUSTRONESIA DI NUSANTARA DAN AWAL PENGARUH HINDU-BUDDHA DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH

Penulis: Libra Hari Inagurasi



Suasana diskusi para reviewer ketika menelaah roposal penelitian Puslitarkenas oleh para reviewer Februari 2018. Sumber: Puslitarkenas 2018.

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarkenas) memiliki tugas dan fungsi penelitian arkeologi di wilayah Indonesia. Sebelum penelitian, proposal yang telah diajukan oleh para peneliti ditelaah terlebih dahulu oleh para *reviewer*. Para *reviewer* bukan hanya menelaah proposal dari Puslitarkenas tetapi juga proposal penelitian dari Balai-Balai Arkeologi (Balai). Balai Arkeologi yang terdapat di Indonesia berjumlah sepuluh Balai yakni: Balai Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Penelaahan proposal penelitian Puslitarkenas dan Balai Arkeologi se-Indonesia tahun 2018 dilakukan pada tanggal 12-15 Februari 2018 di Puslitarkenas.

Tujuan *review* proposal penelitian: 1) untuk mengarahkan *output* penelitian sesuai program prioritas nasional 2) meningkatkan kualitas penelitian dengan cara menciptakan penelitian kompetitif, dengan melibatkan para *reviewer* dari berbagai lembaga untuk memilih proposal penelitian yang layak dilaksanakan dan dibiayai sesuai regulasi penelitian dari Kementerian Riset Teknologi, Pendidikan Tinggi dan Kementerian Keuangan.

Para *reviewer* 14 orang, berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas

Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Udayana, Universitas Indra Prasta (Unindra), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Biomolekuler Eijkman, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan profesional.

Bulan Maret - April 2018 telah dilaksanakan dua penelitian yakni penelitian di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan Kendal, Jawa tengah.

PENELITIAN DIASPORA PENUTUR AUSTRONESIA DI NUSANTARA: PENELUSURAN DI SUMBA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR.

Waktu Pelaksanaan: 22 Maret - 4 April 2018

Lokasi: Lambanapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Ketua Tim: Dra. Retno Handini, M.Si.

Anggota tim berjumlah 11 orang dan 3 orang narasumber. Terdiri dari tenaga multi disiplin antara lain palaeantropolog, arkeolog, geolog, teknisi pemetaan, teknisi penggambaran, ahli pitolith, mahasiswa dan administrasi.

Hasil: Temuan 13 individu rangka dengan sistem *secondary burial* berasosiasi dengan tempayan dan bekal kubur dan temuan logam. Analisis bahwa Lambanapu telah dihuni setidaknya sejak 2000 tahun lalu berlanjut pada masa pengenalan logam yg



Antusias warga mengunjungi lokasi ekskavasi pada penelitian Diaspora Penutur Austronesia di Lambanapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sumber: Puslitarken 2018

PENELITIAN ARKEOLOGI DI KENDAL: AWAL PENGARUH HINDU-BUDDHA DI PANTAI UTARA JAWA TENGAH.

Waktu pelaksanaan: 22 Maret - 10 April 2018

Lokasi: Candi Trisobo, Kecamatan Boja dan Candi Tegal Sari, Kangkung, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Ketua Tim: Agustijanto Indradjaya, M.Hum. Topik terkait masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara sebenarnya telah menjadi perhatian para peneliti sejak dahulu. Hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat sejak abad ke 5-7 diketahui dua kerajaan bercorak Hindu Tarumanagara dan Kutai telah hadir di Nusantara. Namun keterbatasan data arkeologi membuat informasi tentang masalah ini seperti jalan di tempat. Masalah yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Awal pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah pun termasuk hal yang masih belum banyak diungkap. Sementara itu data prasasti yang dapat dianggap cukup tua sejaman dengan masa awal kemunculan Mataram kuno sekitar awal abad ke-7 lebih banyak ditemukan di bagian utara Jawa Tengah. Beberapa di antaranya cukup penting seperti prasasti Sojomerto dan prasasti Bale Kambang, di Batang serta prasasti Tungtang di Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan di pantai utara Jawa Tengah sebenarnya memainkan peran penting dalam tahap kedatangan pengaruh Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Penelitian arkeologi di Kabupaten Kendal bertujuan untuk mengetahui awal pengaruh Hindu-Buddha khususnya di Kabupaten Kendal dan umumnya di pantai utara Jawa Tengah. Penelitian difokuskan di dua bentang geografis berbeda yakni Situs Tegal Sari di Kecamatan Kangkung yang termasuk dalam wilayah pantai dan Situs Trisobo, Kecamatan Boja yang termasuk wilayah perbukitan. Di situs Trisobo berhasil mengungkap adanya bangunan candi berukuran 8 x 8 meter yang secara arsitektural memiliki kemiripan dengan candi -candi Gedong Songo.

memperlihatkan adanya pertukaran dengan wilayah lain.

Seusai penelitian dilanjutkan dengan kegiatan Rumah Peradaban yang merupakan sinergi antara Puslitarken, Balai Arkeologi (Balar) Bali, dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Rumah Peradaban dihadiri oleh 1000 (seribu) siswa sekolah. Dalam Rumah Peradaban diterapkan *information on the spot* melalui Majalah Dinding Rumah Peradaban dan *information box* di dalam kotak ekskavasi apa saja artefak, ekofak yang telah ditemukan. Diharapkan pengunjung pada lokasi penelitian lebih memahami budaya masa lalu melalui hasil-hasil penelitian arkeologi.

Sedangkan di Situs Tegal Sari yang diketahui sebuah bangunan candi bata berada sekitar dua meter di atas permukaan laut, masih dipelajari lingkungan masa lalu ketika candi didirikan.



Peneliti Puslitarken, Agustijanto Aindradjaya (berdiri kiri) berada di kotak ekskavasi pada penelitian Awal Pengaruh Hindu-Buddha di Kendal, Jawa Tengah, tahun 2018. Sumber: Puslitarken 2018.



Ekskavasi dalam rangka Penelitian Arkeologi di Kendal untuk mengungkap Awal Pengaruh Hindu-Buddha di Pantai Utara Jawa Tengah, tahun 2018. Sumber: Puslitarken 2018.

PENGELOLAAN DATA DAN ANALISIS ARTEFAK

Penulis: Libra Hari Inagurasi

Kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak merupakan kegiatan rutin Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarkenas) yang dilakukan sejak tahun 2013. Temuan arkeologi yang diperoleh dari kegiatan penelitian terkadang volumenya cukup melimpah sehingga perlu gudang atau tempat untuk penyimpanan. Situs-situs arkeologi yang memiliki tempat penyimpanan ialah situs Plawangan, Trowulan, Banten, dan Barus.

Bulan Februari sampai dengan Maret 2018 Bidang Konservasi dan Arkeometri Puslitarkenas, telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Analisis Artefak di tiga gudang penyimpanan artefak yakni di Plawangan, Trowulan dan Barus. Lingkup kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak tahun 2018 mencakup hal-hal yang berkaitan dengan: pengidentifikasian, klasifikasi, dan pembuatan basis data.

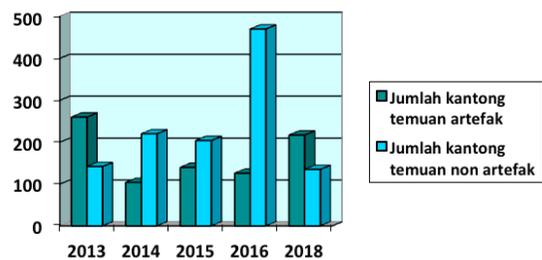
PENGELOLAAN DATA DAN ANALISIS ARTEFAK SITUS PLAWANGAN

Situs Plawangan merupakan kawasan arkeologi yang sangat potensial dalam hal data materi kubur prasejarah yang mewakili pantai utara Jawa Tengah-Jawa Timur. Kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak di Situs Plawangan dilaksanakan oleh para peneliti kajian prasejarah diantaranya Prof. Ris. Dr. Bagyo Prasetyo, E. Wahyu Saptomo M.Hum, dan Jatmiko M.Hum, dibantu teknisi. Waktu pelaksanaan dari tanggal 22 sampai 28 Januari 2018. Plawangan merupakan kawasan arkeologi yang berada di Desa Plawangan dan Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 100 ha. Kawasan Plawangan merupakan dataran undak pantai utara Jawa, dengan jarak jangkau sekitar 500 meter dari garis pantai serta mempunyai ketinggian 4 meter dari permukaan air laut dengan tingkat kelerengan kurang dari 8°. Geomorfologis daerah Plawangan merupakan bentang alam daerah pesisiran (pantai) terdiri dari kawasan pantai dan kawasan pesisiran.

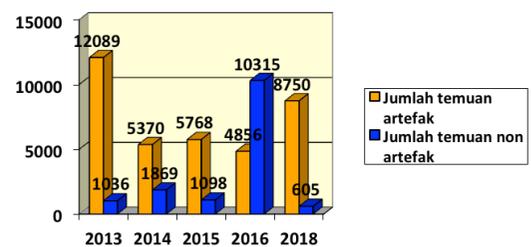
Gambaran hasil kegiatan pengolahan data dan analisis Situs Plawangan tahun 2018 sebagai berikut. Jenis-jenis temuan meliputi artefak (1) tembikar atau wadah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Bentuk-bentuk tembikar meliputi cawan, periuk, kendi, tempayan, tutup, pegangan, dan bentuk yang belum dapat diidentifikasi; (2) terakota, dikelompokkan menjadi 3 bagian bentuk yaitu bandul jala, genteng, dan bagian bentuk yang belum teridentifikasi artefak dari batuan; (3) batuan berbentuk batu pelandas dan kapak penetak dari bahan batuan andesit; (4) kaca berbentuk manik-manik dengan bagian bentuk silindris; (5) keramik berbentuk fragmen cawan/mangkuk dengan bagian bentuk badan putih dengan pola hias flora warna



Peneliti Puslitarkenas Prof. Ris. Bagyo Prasetyo (duduk kanan) dan Wahyu Saptomo M.Hum. (duduk tengah) sedang melakukan kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak di gudang artefak Situs Plawangan Tahun 2018. Sumber: Puslitarkenas 2018.



Jumlah kantong temuan kegiatan analisis Situs Plawangan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2018



Jumlah temuan artefak dan non artefak hasil analisis Situs Plawangan Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2018

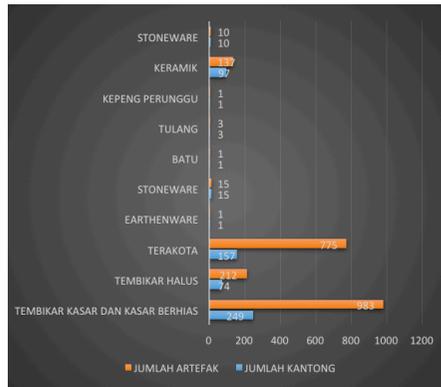
biru; (6) logam berupa mata uang *kepeng* perunggu. Selain temuan artefak terdapat pula temuan non-artefak yang dikelompokkan dalam jenis organisme seperti organisme dari Homo Sapiens, Mammalia, ikan, kerang (Moluska), kepiting (Malacostrata), terumbu karang dan Homo Sapiens. Bagian-bagian organisme terdiri dari mandibular, tengkorak, tulang jari kaki, dan tulang belakang ikan.

PENGELOLAAN DATA DAN ANALISIS ARTEFAK SITUS TROWULAN

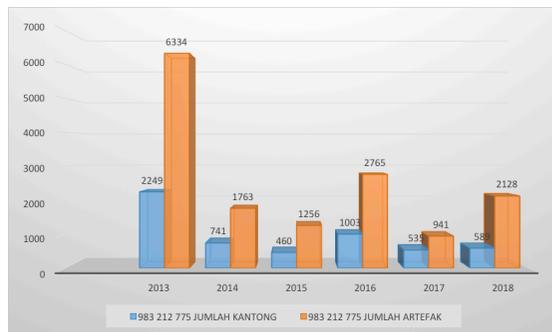
Lokasi kegiatan di gedung artefak arkeologi Situs Trowulan, Jl. Damarwulan No. 19 Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, berlangsung dari tanggal 7 sampai 13 Februari 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 1976 oleh (Puslitarkenkas), Situs Trowulan menunjukkan adanya sisa-sisa kota kuno yang berasal dari masa Majapahit abad ke-13. Tinggalan arkeologi yang ditemukan di Situs Trowulan misalnya adalah fitur berupa candi, batu umpak, kolam segaran, berbagai bentuk struktur bata dan batu yang tersebar di kawasan Situs Trowulan, dan pecahan (fragmen) keramik serta tembikar. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan penanganan kondisi penyimpanan temuan-temuan arkeologi pada Gedung Artefak Trowulan yang dimiliki Puslitarkenkas. Pengelolaan data dan analisis artefak dilaksanakan oleh peneliti kajian Hindu-Budhha dari Puslitarkenkas, Yusmaini Eriawati, M. Hum. dan teknisi serta pranata komputer.

Kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak Situs Trowulan pada tahun 2018 difokuskan pada hasil-hasil penelitian tahun 2007 dan 2008. Mayoritas hasil temuan yang diolah dan dianalisis artefak berupa keramik dan tembikar. Selain itu terdapat pula batu, kepeng dan ekofak berupa tulang binatang. Kegiatan diawali dengan pemilahan temuan untuk keperluan analisis. Analisis yang dilakukan pada keramik adalah identifikasi jenis pecahan, identifikasi bentuk, kronologis, asal, ware, dan glasir. Sementara itu pada analisis tembikar dilakukan identifikasi jenis pecahan, ragam hias, dan teknik buat. Identifikasi jenis pecahan pada keramik dan tembikar terbagi atas tepian, badan, badan hias, bahu, bubungan, cerat, dasar, figurin, hiasan, kaki, leher, payungan, tepian, dan tutup. Identifikasi bentuk dari tembikar terdiri atas anglo, buli-buli, kemuncak, kendi, kual, genteng, jambangan, jobong, pasu, pegangan, pengaron, periuk, pinggan, piring, pot, tempayan, tutup, wadah bertutup, wadah saji, bubungan, dan ornamen sedangkan identifikasi bentuk dari keramik terdiri dari botol, vas, buli-buli, cawan, cepuk, kemuncak, kendi, kual, guci, ornamen, mangkok, piring, tempayan, tutup wadah dan wadah bertutup.

Hasil analisis artefak dan ekofak kemudian dimasukkan ke dalam sistem *database*. Semua temuan hasil analisis dimasukkan ke kantong plastik bernomor dengan nomor yang berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Total jumlah artefak yang telah diinput ke dalam *database* hingga tahun 2018 adalah 598 kantong. Hasil kegiatan Pengolahan Data dan Analisis Artefak di Situs Trowulan dapat dilihat pada tabel dan grafik. Penyimpanan dilakukan dengan memasukkan kantong plastik bernomor ke dalam kontainer plastik yang dipisahkan sesuai jenisnya.



Hasil Pengelolaan Data dan Analisis Artefak Situs Trowulan Berdasarkan Jenis Bahan Temuan



Hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Analisis Artefak Situs Trowulan Tahun 2013-2018



Peneliti Puslitarkenkas, Yusmaini Eriawati, M.Hum., duduk sebelah kanan, melakukan analisis tembikar di gedung artefak Situs Trowulan 2018. Sumber: Puslitarkenkas 2018.



Atika WIndiarti staf pegawai Puslitarkenkas melakukan input database hasil pengelolaan data dan analisis artefak di Gedung artefak Situs Trowulan 2018. Sumber: Puslitarkenkas 2018.

Sumber Foto: Puslitarkenkas, Balitbang

Di bagian luar kontainer dituliskan keterangan yang berisi informasi nomor kantong temuan yang berada di dalam kontainer. Setelah itu, semua kontainer disimpan di dalam rak besi sesuai dengan urutan nomornya di gudang belakang gedung artefak arkeologi Trowulan. Grafik 3 dan grafik 4 berikut ini memperlihatkan hasil kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan hasil kegiatan yang sama yang telah dilakukan dari tahun 2013-2018. Dengan grafik tersebut dapat diketahui perkembangan kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak selama tahun 2013 -2018:

PENGLOLAAN DATA DAN ANALISIS ARTEFAK SITUS BARUS

Lokasi kegiatan di gedung artefak Situs Barus, berada di Pasar Batu Geligis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan dari tanggal 9 sampai 15 Maret 2018. Peneliti Kajian Islam-Kolonial menangani pengelolaan data dan analisis artefak Situs Barus yakni Sonny Wibisono, M.A., DEA, dan Drs. Heddy Surachman. Kegiatan tersebut merupakan pengelolaan data dan analisis artefak hasil penelitian arkeologi Situs Barus tahap awal yang dilakukan oleh Puslitarken. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan penanganan kondisi penyimpanan temuan-temuan arkeologi pada gedung artefak di Situs Barus. Situs Barus ini dinilai penting karena merupakan penanda masuknya Islam ke Sumatera. Perkembangan Islam di Indonesia antara lain melalui Barus di Pulau Sumatera. Situs Barus memiliki kekayaan tinggalan arkeologi diantaranya makam-makam kuno. Menurut catatan-catatan Cina Dinasti Táng, kehadiran Islam di Indonesia boleh jadi sudah ada sejak abad ke 7-8. Situs Barus dengan tinggalan arkeologinya diduga bukti kehadiran Islam pada abad ke-9 sampai abad ke-13.

Kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak Situs Barus pada tahun 2018 memetakan permasalahan yang ada pada temuan di gedung artefak di Barus. Langkah pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah memberikan nomor rak temuan agar temuan lebih mudah dicari dan dapat dikembalikan lagi pada tempat semula ketika telah diambil. Nomor rak didasarkan pada nomor lemari, letak baris dan letak kolom dalam lemari. Lemari 1 dan 2 diperuntukkan untuk tembikar kasar, lemari 3 dan 4 diperuntukkan untuk tembikar halus, tembikar berglasir, kaca, besi sedangkan lemari 5 dan 6 untuk temuan keramik. Setelah itu mengambil temuan-temuan untuk dianalisis. Temuan hasil kegiatan penelitian di Situs Barus telah dipilah dan disusun rapi berdasarkan nama situs, sektor, kotak temuan serta jenis temuan. Artefak tembikar dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu badan dan hias. Kelompok hias dianalisis



Peneliti Puslitarken, Sonny Wibisono, M.A., DEA, tekun melakukan analisis di gedung artefak Situs Barus 2018. Sumber: Puslitarken 2018.



Suasana dalam kegiatan pengelolaan data dan analisis artefak di gedung artefak Situs Barus 2018. Duduk paling kiri Drs. Heddy Surachman, peneliti Puslitarken. Sumber: Puslitarken 2018.

lebih lanjut terhadap bentuk dan jenis hiasannya kemudian difoto dan diberikan nomor temuan. Kelompok badan hanya diberikan nomor saja, tidak dilakukan analisis lebih lanjut. Bentuk tembikar terbagi menjadi tepian, dasar, badan, karinasi dan *unidentified*. Teknik hias pada temuan terdiri dari hias cukil, hias gores, hias gores sisir, hias larik, hias *aplique*, hias gores-geo, hias gores titik, hias lundang-lundang, hias *paddle*, hias *paddle* tali, hias *paddle* keranjang, hias tekan *aplique*, hias tekan tali, hias tusuk, dan hias keranjang. Setelah dianalisis, artefak dimasukkan kantong plastik bernomor ke dalam plastik dan dikembalikan sesuai letaknya semula.

Pada tahun 2018 ini telah dibuat *database* untuk Situs Barus dan telah diinput sebanyak 153 data tembikar kasar yang berasal dari Situs Bukit Hasang, Sektor A-01, Kotak A4, A4 fitur dan A5. Beberapa temuan karakteristik (tembikar kasar, tembikar halus, tembikar berglasir, kaca, terak besi) difoto, digambar untuk dalam rangka pembuatan Sistem Informasi Artefak di Barus dan dibawa untuk dilakukan analisis unsur. Selain itu, sebanyak 25 kantong temuan yang terletak di gudang bagian belakang telah diganti dan didata ulang.

AKREDITASI: DARI COMPLIANCE KE PERFORMANCE

Penulis: Dr. Biyanto, M.Ag. (Anggota BAN PAUD dan PNF)

Patut disyukuri, kini kebutuhan satuan pendidikan terhadap proses akreditasi semakin meningkat. Satuan pendidikan formal dan nonformal semakin menyadari pentingnya akreditasi. Pendidikan nonformal (PNF) dalam berbagai bentuknya, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), juga menempatkan akreditasi sebagai mekanisme penjaminan mutu.

Untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN). Kemendikbud membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) serta Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Sementara Kemenristek Dikti membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN PAUD dan PNF, BAN S/M, dan BAN-PT memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan akreditasi secara profesional, mandiri, dan berintegritas.

Pelaksanaan akreditasi secara eksternal melalui masing-masing badan yang dibentuk pemerintah terasa sangat efektif untuk menjamin mutu satuan pendidikan. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui mutu satuan pendidikan melalui status akreditasinya. Semakin baik status akreditasi suatu satuan pendidikan berarti proses penjaminan budaya mutunya semakin terjaga. Sebaliknya, jika status akreditasi satuan pendidikan tertentu buruk, berarti budaya mutunya belum terjaga dengan baik. Pada konteks itulah masyarakat sebagai pengguna pendidikan harus dengan cermat mengecek status akreditasi lembaga pendidikan agar tidak tertipu. Para orangtua juga penting menanyakan status akreditasi lembaga sebelum mendaftarkan anaknya pada satuan pendidikan. Status akreditasi penting untuk memastikan anak-anak belajar di lembaga pendidikan yang memiliki mutu baik. Status akreditasi juga penting untuk menjamin bahwa ijazah anak-anak dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang legal.

POTRET MUTU: PAUD DAN PNF

Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD dan Dikmas Kemendikbud menyebutkan bahwa jumlah populasi PAUD dan PNF pada 2017 mencapai 258.146 satuan dengan rincian PAUD (228.140), LKP (18.744), PKBM (11.262), dan SKB (297). Dari total jumlah PAUD dan PNF, satuan pendidikan yang belum terakreditasi mencapai 228.540 (88.42%) (Sumber: Referensi Data Kemdikbud) Maret 2018. Hal tersebut berarti satuan pendidikan PAUD dan PNF yang terakreditasi masih sangat sedikit. Untuk mengejar ketertinggalan lembaga yang belum terakreditasi, pada 2018 pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan akreditasi sebanyak 30.275 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat drastis jika dibanding jumlah

alokasi akreditasi pada 2017 yang hanya 10.913 program dan satuan PAUD dan PNF. Peningkatan alokasi pembiayaan akreditasi menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan legalitas dan penjaminan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Komitmen tersebut penting karena semua satuan pendidikan wajib mengikuti akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pada *stakeholders*. Bahkan pada masa mendatang akreditasi juga wajib dilaksanakan pada Madrasah Diniyah (Madin). Akreditasi Madin penting sebagai bagian dari akuntabilitas penjaminan mutu lembaga. Apalagi sebagian pendanaan kegiatan Madin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Madin merupakan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang hingga kini belum tersentuh proses akreditasi. Semua satuan pendidikan harus menyadari bahwa akreditasi merupakan amanah konstitusi sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Jika dicermati, satuan pendidikan PAUD dan PNF sejatinya memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi emas bangsa pada masa mendatang. Pendidikan bermutu saat anak berusia emas (*golden age*) penting menjadi perhatian semua pihak. Apalagi pemerintah sedang merancang bangun generasi emas 2045. Jika penjaminan mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF dilakukan secara berkelanjutan, maka hal itu akan memberi sumbangan berharga bagi generasi emas bangsa saat memasuki abad XXI. Pada abad XXI inilah generasi bangsa harus memiliki sekurang-kurangnya empat kompetensi (4C), yakni berpikir kritis (*critical thinking*), komunikatif (*communicative*), kreatif (*creative*), dan kolaboratif (*collaborative*).

Sayang sekali sebagian satuan pendidikan PAUD dan PNF belum memandang penting akreditasi, dikarenakan akreditasi PAUD dan PNF terasa belum memiliki pengaruh sosial (*social effect*) yang besar. Kondisi itu jelas berbeda dengan pengaruh sosial akreditasi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. Padahal semestinya tidak ada alasan bagi satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk menghindari proses akreditasi. Jika ada satuan pendidikan PAUD dan PNF enggan mengajukan akreditasi, maka itu bukan hanya

melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dari itu bahwa satuan pendidikan tersebut berarti tidak mau memberikan pertanggungjawaban dalam kaitan dengan proses penjaminan mutunya pada *stakeholders*. Melalui mekanisme akreditasi dapat dipastikan bahwa satuan pendidikan telah menerapkan konsep penjaminan mutu yang berkelanjutan.

DARI PEMENUHAN KE PERFORMANSI

Penjaminan mutu merupakan penetapan standar pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan. Hasil penelitian tim dosen Universitas Gadjah Mada (2007) menegaskan bahwa kebutuhan *stakeholders* pendidikan yang terutama adalah kebutuhan sosial, dunia kerja, dan profesional. Hal itu menunjukkan bahwa pihak yang berkepentingan dengan mutu layanan pendidikan bukan hanya peserta didik, melainkan juga masyarakat dan pengguna lulusan (*user*).

Yang perlu ditekankan, sistem penjaminan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan (*continous improvement*). Hal itu penting agar penjaminan mutu menjadi gerakan hingga membentuk budaya semua ekosistem pendidikan. Dengan demikian orientasi penjaminan mutu tidak boleh sekedar memenuhi kebutuhan pada saat penilaian akreditasi. Dengan kata lain, akreditasi satuan pendidikan tidak boleh sekedar pemenuhan kebutuhan standar minimal pendidikan (*compliance*), tetapi akreditasi harus benar-benar memotret performansi satuan pendidikan (*performance*).

Agar akreditasi bergerak dari sekedar pemenuhan kebutuhan delapan standar sebagaimana ditentukan SNP ke performansi, maka satuan pendidikan harus melampaui SNP. Komitmen ini penting karena harus diakui, butir-butir instrumen dalam akreditasi lebih banyak yang berkaitan dengan soal-soal administrasi. Instrumen akreditasi belum dirancang secara komprehensif untuk memotret performansi dan budaya mutu satuan pendidikan. Inilah tantangan bagi badan akreditasi yang dibentuk pemerintah. Badan akreditasi di masing-masing level harus mampu membuat perangkat akreditasi yang tidak sekedar *compliance*, tetapi benar-benar mengarah ke *performance* satuan pendidikan.

Untuk menghasilkan potret performansi satuan pendidikan dalam penerapan budaya mutu jelas dibutuhkan asesur yang berkualitas. Harus diakui, asesur merupakan ujung tombak dalam sistem akreditasi. Karena itu, program peningkatan kapasitas asesur sebagai juru potret satuan pendidikan penting dilakukan. Apalagi kini dalam menjalankan tugas asesur harus mengikuti perkembangan mekanisme akreditasi yang menggunakan aplikasi *online*, yakni Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Pada 2018 ini, Sispena wajib diterapkan dalam sistem akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF. Melalui Sispena,

pelaksanaan akreditasi diharapkan lebih efektif, terpercaya, cepat, dan murah.

Bukan hanya asesur, satuan pendidikan juga harus membiasakan untuk mengisi Evaluasi Diri Satuan (EDS) masing-masing melalui aplikasi Sispena. Satuan pendidikan yang tidak mengisi EDS melalui Sispena dengan sendirinya tidak masuk kuota akreditasi. Melalui aplikasi Sispena, mekanisme pelaksanaan akreditasi tidak lagi menggunakan borang dan tanpa kertas (*paperless*). Mekanisme manual dan tumpukan borang akreditasi diganti dengan sistem daring (*online*). Dengan demikian, asesur dan satuan pendidikan harus terampil menggunakan aplikasi akreditasi melalui Sispena. Itu berarti asesur dan satuan pendidikan harus melek teknologi, informasi, dan komunitas (TIK). Tantangannya adalah perluasan akses layanan jaringan internet di seluruh satuan pendidikan agar dapat mengikuti mekanisme akreditasi dengan menggunakan aplikasi Sispena.

AKREDITASI DAN BUDAYA MUTU

Setiap penyelenggara satuan pendidikan harus menyadari bahwa pada masa mendatang eksistensi lembaga pendidikan tidak boleh bergantung pada pemerintah. Nasib lembaga pendidikan akan sangat bergantung pada penilaian *stakeholders*-nya. Penilaian dalam hal ini terutama terkait mutu layanan pendidikan pada masyarakat. Itu berarti penilaian *stakeholders* memiliki kedudukan yang sangat penting. Pada konteks itulah Guru Marketing Dunia, Hermawan Kartajaya (2009), menegaskan bahwa *stakeholders* memiliki *positioning* yang sangat penting.

Satuan pendidikan yang tidak cerdas merespon kemauan pelanggan (*customer*) pasti akan ditinggalkan *stakeholders*. Jika situasi sudah demikian, maka cepat atau lambat lembaga pendidikan pasti terpuruk. Faktor kepuasan *stakeholders* penting menjadi pertimbangan pengelola lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Substansi pengertian mutu sesungguhnya berkaitan dengan terpenuhinya standar dan janji yang telah diutarakan pada *stakeholders*. Itu berarti satuan pendidikan akan disebut bermutu jika memenuhi standar mutu layanan yang dijanjikan pada *stakeholders*.

Pada konteks itulah akreditasi menjadi mekanisme yang efektif untuk menilai budaya mutu setiap satuan pendidikan. Akreditasi juga bermanfaat untuk menilai standar mutu layanan yang diberikan satuan pendidikan pada peserta didik, pemerintah, masyarakat, dan pengguna lulusan. Dengan demikian berarti bahwa setiap satuan pendidikan, termasuk PAUD dan PNF, harus mengikuti proses akreditasi untuk memastikan legalitas dan penjaminan budaya mutu lembaga. Akhirnya, semoga satuan pendidikan PAUD dan PNF terus berbenah untuk meningkatkan proses akreditasi dari sekedar pemenuhan kebutuhan standar minimal ke pencapaian performansi.

UJIAN NASIONAL TAHUN 2018

Penulis: Teuku Ramli Zakaria, M.A., Ph.D (Anggota BSNP)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah selesai menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018. UN tersebut diselenggarakan secara berurutan sebagai berikut: UN Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) berlangsung mulai tanggal 2-5 April 2018, UN Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (SMA/MA) mulai tanggal 9-12 April 2018, UN Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) berlangsung mulai tanggal 23-26 April 2018 dan UN Pendidikan Kesetaraan (Program Paket C) mulai 27 April- 2 Mei 2018, dan UN Program Paket B/Wustha berlangsung mulai tanggal 4-7 Mei 2018. UN Susulan pada masing-masing jenis dan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut dilaksanakan 1 minggu setelah UN Utama. UN Susulan diikuti oleh peserta UN yang sudah terdaftar dan berhalangan mengikuti UN Utama, disertai dengan alasan dan bukti berhalangan yang sah.

Selain UN Utama dan UN Susulan, dalam POS UN diatur pula tentang UN Perbaikan, yang dapat diikuti oleh peserta UN Utama dan UN Susulan, yang ingin memperbaiki nilai. Nilai yang dapat diperbaiki adalah nilai mata pelajaran yang ≤ 55 . UN Perbaikan akan diselenggarakan pada bulan Juli 2018, seluruhnya akan menggunakan moda UNBK.

TUJUAN UJIAN NASIONAL

Hakikat UN adalah penilaian oleh Pemerintah, yang dalam penyelenggaraannya ditugaskan kepada BSNP. Tujuan UN adalah untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh dalam lingkup nasional. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 58 Ayat (2) Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa "Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan". Dalam hal ini, UN merupakan instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), salah satu dari Standar Nasional Pendidikan.



MANFAAT HASIL UJIAN NASIONAL

Hasil UN, menurut Pasal 68 PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat dimanfaatkan sebagai berikut.

- Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan.
- Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sebelum terbitnya PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UN memiliki satu manfaat penting yang lain, yaitu sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kelulusan.

KRITERIA PENYELENGGARAAN UN

Menurut Pasal 66 Ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005, yang sudah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang SNP, "UN dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel". Namun menurut Pasal 58 Ayat (2) UU Sisdiknas, seperti telah dikutip di atas, UN



dalam rangka mengevaluasi pencapaian SKL harus diselenggarakan dengan 4 kriteria sebagai berikut.

1. BERKALA: UN sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun, seperti dijelaskan pula dalam Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. MENYELURUH: Artinya, UN tidak diselenggarakan secara sampling, tetapi secara sensus terhadap populasi. Oleh karena itu, UN harus diikuti oleh seluruh peserta didik secara nasional. Pasal 69 Ayat (1) dan (2) PP tersebut mengatur bahwa setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal, wajib mengikuti UN satu kali tanpa dipungut biaya.

3. TRANSPARAN: Artinya terbuka, antara lain dapat dilihat pada materi yang akan diujikan

telah disosialisasikan dalam bentuk kisi-kisi, prosedur pelaksanaan dan penskorannya telah distandarkan, seperti yang telah dipublikasikan dalam Prosedur Operasi Standar penyelenggaraan UN.

4. SISTEMIK: Artinya, UN diselenggarakan secara tersistem, tidak bersifat *ad.hoc*. Dalam pelaksanaan UN saat ini masih ada kesan *ad.hoc*, setiap tahun masih memerlukan pembentukan panitia pelaksana, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai pada tingkat nasional. Hal ini disebabkan, di Indonesia belum ada lembaga pengujian mandiri, yang memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan ujian, seperti di beberapa negara-negara lain. Misalnya, di Malaysia ada Lembaga Peperiksaan, lembaga ini berada di bawah Kementerian Pendidikan, namun independen dari pengaruh Kementerian. Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri sekalipun tidak dapat melakukan intervensi berkaitan dengan ujian. *Singapore Examination and Assessment Board (SEAB)* di Singapura, merupakan lembaga swasta, independen dalam penyelenggaraan ujian, dan langsung bertanggung jawab kepada Parlemen. Contoh lain, *America College Testing*

(ACT) di Iowa, Amerika Serikat, dan *University of Cambridge Local Examination Syndicate di Cambridge (UCLES)* di Inggris.

Dilihat dari perspektif 4 kriteria yang ditetapkan dan UU Sisdiknas tersebut, kriteria keempat belum terlaksana dengan baik, masih perlu perbaikan dan pengembangan.

PERBAIKAN UN TAHUN 2018

BSNP telah melakukan berbagai perbaikan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Perbaikan dalam penyelenggaraan UN Tahun 2018 antara lain sebagai berikut.

1. Perbaikan kualitas penyelenggaraan, baik UN pendidikan formal maupun pendidikan nonformal kesetaraan. Perbaikan UN pendidikan nonformal kesetaraan, dimulai dengan penertiban pendataan, harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan Masyarakat (DAPODIKMAS), fungsi UN sebagai Ujian Kesetaraan, dan penekanan pada penggunaan moda UNBK.
2. Mengutamakan penggunaan moda UNBK. Dalam perencanaan awal, dalam pelaksanaan UN tahun 2018, diharapkan 100% SMA sederajat dan 70% SMP sederajat dapat menggunakan moda UNBK. Dalam praktiknya, harapan tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya. Namun demikian, perkembangan penggunaan moda UNBK semakin besar. Misalnya: SMK/MAK Negeri dan Swasta 98,38% UNBK dan 1,62% UNKP. SMA/MA Negeri dan Swasta, Program IPA 92,97% UNBK dan 7,03% UNKP. Program Studi IPS 89,31% UNBK dan 10,69% UNKP, Program Studi Bahasa 86,24% UNBK dan 13,76% UNKP. Demikian pula pada jenjang SMP/MTs, misalnya di Provinsi Jawa Barat, di antara 8.005 sekolah, dalam pelaksanaan UN Tahun 2018, kurang lebih 55% masih menggunakan moda UNKP dan baru 45% menggunakan moda UNBK. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah dapat melaksanakan UN dengan moda UNBK 100%. Misalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kota Surabaya.

Praktik baik dalam pelaksanaan UNBK, yang diperoleh dalam pemantauan pada waktu pelaksanaan UN tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Kejujuran dapat ditegakkan, kecil kemungkinan terjadinya kecurangan;
2. Pelaksanaan UN lebih efisien dan ekonomis, tidak memerlukan pencetakan dan pendistribusian soal, yang selama ini menghabiskan biaya yang sangat besar;
3. Pelaksanaan UN dapat dilakukan secara lebih

“Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.

fleksibel, sehingga memudahkan pelaksanaan UN lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan;

4. Lebih cepat proses penskoran, sehingga hasil UN dapat diketahui lebih cepat, dan pengumuman hasil UN dapat dilakukan lebih cepat pula;
5. Beban Panitia pada Tingkat Satuan Pendidikan, tingkat Kabupaten/Kota, dan tingkat Provinsi, lebih ringan, tidak terbebani dengan pekerjaan pendistribusian dan pengamanan bahan ujian, yang selama ini dirasakan sangat berat;
6. Keterlibatan polisi dalam pengamanan bahan dan pelaksanaan ujian dapat ditiadakan. Hal ini sangat penting, untuk menghilangkan kesan negatif yang berkembang saat ini, UN seperti peristiwa kriminal, karena keterlibatan kepolisian.

PENUTUP

UN perlu dipertahankan sebagai salah satu instrumen penting dalam pemetaan, peningkatan, dan pemerataan mutu pendidikan. Ujian akhir sekolah, dengan sepenuhnya menjadi kewenangan sekolah pada masa berlakunya Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) menyebabkan kita kehilangan tolok ukur mutu pendidikan. Nilai ujian akhir antar sekolah dan antar daerah tidak bisa dibandingkan. Semua sekolah cenderung meluluskan peserta didiknya 100%, mereka tidak dibekali dengan kompetensi minimal yang memadai, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang mereka tempuh. UN dengan moda UNBK, seperti dijelaskan di atas, telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap manajemen dan hasil UN. Oleh karena itu, moda UNBK perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan di masa yang akan datang, dalam rangka membangun sistem ujian akhir pendidikan dasar dan menengah yang kredibel dan akuntabel.

“BERMAIN PERAN DI HALAMAN SEKOLAH UNTUK MEMAHAMI BACAAN”

Penulis: Tim INOVASI

KONTEKS DI DAERAH

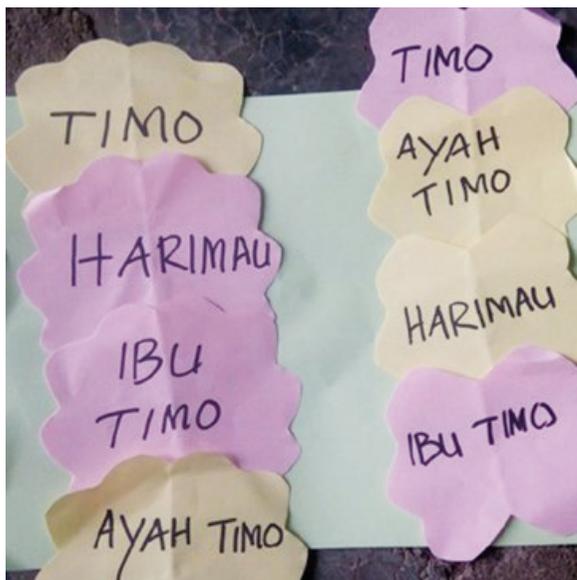
SDN Wareng adalah salah satu sekolah yang berada didesa Rambitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah, yang lokasinya dekat dengan Makam Nyatok yang cukup terpencil. Siswa berjumlah 113 orang (L: 65, P: 48), dengan 8 orang guru dan 1 kepala sekolah. Termasuk dalam Gugus 9 yang berdiri tahun 1984. Sebagian besar orang tua siswa berprofesi sebagai petani. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP).



Aciwati, Guru kelas 2 SDN Wareng, Lombok Tengah.

TANTANGAN PEMBELAJARAN

Siswa mengalami kesulitan dalam menceritakan kembali isi cerpen dengan kata-kata mereka sendiri. Hal ini diduga karena siswa belum dapat berbicara literasi dengan lancar, sehingga kesulitan dalam menceritakan kembali atau mengekspresikan kembali isi cerpen.



Bermain Peran untuk memahami bacaan.
Sumber Foto: Tim INOVASI

SOLUSI POTENSIAL

Menggunakan metode permainan peran untuk membantu siswa agar terbiasa dan mampu menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa atau kata-kata sendiri. Metode ini dilaksanakan di halaman sekolah.

CATATAN REFLEKSI GURU

Ide solusi ini diperoleh setelah mengikuti workshop GURU BAIK, yang kemudian dimantapkan di sekolah sesuai SKD (Program Semester). Dengan memerankan tokoh dalam cerita dapat membantu

siswa memahami dan menceritakan kembali isi cerita. Tingkat keberhasilan dilihat dari rubrik/ keterampilan siswa, serta hasil pre dan post-test yang memang mengalami peningkatan. Ketika mengikuti pelajaran siswa pun menjadi lebih aktif, semangat dan memahami isi cerita dan nilai KKM pun tercapai. Kedepannya, cerita yang akan menjadi bahan pelajaran akan mengangkat cerita lokal, ataupun tokoh yang memang ada disekitar siswa - tidak menggunakan cerita atau tokoh yang belum pernah dilihat siswa.

Tips: Sebagai guru sebelum mulai mengajar hendaknya kita harus menyiapkan RPP, dan metode yang variatif. Saya mengajak semua rekan guru untuk menerapkan inovasi dalam pembelajaran.

PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Awal (5 menit)

1. Guru memulai pelajaran dengan mengkondisikan siswa supaya siap menerima pembelajaran dengan mengajak bernyanyi bersama terlebih dahulu
2. Guru membacakan cerita dongeng secara utuh

Tes Awal (5 menit)

1. Memberikan *pre test* (tes awal) berupa tes tulis (tes pengetahuan)

Kegiatan inti (30 menit)

1. Guru membagikan teks cerita kepada siswa
2. Guru membagi siswa menjadi kelompok kecil yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa, yang berperan sebagai kancil, ibu, dan harimau
3. Guru mengajak siswa bermain peran di halaman sekolah

Penutup (20 menit)

1. Guru mengajak siswa kembali ke dalam kelas
2. Guru meminta siswa satu persatu menceritakan kembali cerita dongeng yang telah diperankan dengan kriteria penialain berdasarkan rubrik penilaian yang dibuat (tes keterampilan)
3. Guru memberikan tes tulis kepada seluruh siswa (tes pengetahuan)
4. Guru memberikan penguatan kepada siswa
5. Guru memberikan kesimpulan dan pesan moral dari cerita dongeng
6. Melakukan penilaian terhadap respon siswa menggunakan 2 toples yang bertuliskan suka/tidak suka

Waktu yang dibutuhkan untuk mengajar ide solusi

4 kali (1 bulan)

Bahan-bahan yang dibutuhkan

Bahan cerita, RPP, Silabus, KKM, Lembar Kerja

MEDIA PEPERANGAN BELA LAUT INDONESIA (PENGOPERASIAN PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BELAJAR BILANGAN BULAT INDAH, INOVATIF, EFISIEN DAN AKTIF)

Penulis: Tim INOVASI

SDN Sepuhgembol 1, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sekolah yang gurunya berhasil memenangkan lomba inovasi pendidikan di tingkat kabupaten dan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba karya ilmiah dari hasil inovasinya di tingkat nasional. Bermula dari keprihatinan Pengawas Sekolah tentang beberapa hal seperti pendapat bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan menjadi "momok" bagi peserta didik yang tidak menyukainya dan hasil belajar peserta didik kurang memuaskan dan cenderung menurun. Guru dalam pembelajarannya terlihat monoton. Permasalahan tersebut telah mendorong Pengawas Sekolah untuk berinovasi mencari media yang tepat agar matematika menjadi mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Pengawas mulai berdiskusi dengan para guru dan kepala sekolah tentang ide membuat media belajar untuk matematika yang mudah dan murah. Media matematika dengan nama Peperangan Bela Laut Indonesia (pengoperasian penjumlahan dan pengurangan belajar bilangan bulat indah, inovatif, efisien dan aktif) ini berawal dari lomba inovasi guru. Sholehuddin, guru muda ini menjawab tantangan dan ikut lomba inovasi guru. Ia akhirnya menang dan berangkat ke Jakarta untuk lomba karya ilmiah di tingkat nasional. Saat ini, Pak Sholehuddin mengajar di SDN Cempoko I Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.



Sholehuddin, Guru SDN Cempaka, Kab. Probolinggo
Pemenang lomba INOVASI Pendidikan di tingkat Kabupaten

PROGRAM DAN KEGIATAN

Media Peperangan Bela Laut Indonesia

Media matematika ini dibuat dengan menggunakan komponen sebagai berikut:

- Kayu tipis/tripleks. Tripleks tersebut dicat dengan 2 warna yang berbeda yaitu merah dan hijau. Merah berarti berani, agar anak berani mencoba hal baru; sementara hijau warna yang sejuk menyenangkan anak-anak. Kedua warna tersebut akan menjadi wilayah penjumlahan dan pengurangan yang saling bersebelahan.
- Bola.
- Botol bekas air mineral. Botol bekas tersebut disusun untuk lewat keluar masuknya bola.
- Stik es krim untuk mendorong bola keluar.
- Nampan plastik sebagai wadah untuk menampung bola-bola yang digunakan dalam membantu memahami konsep penjumlahan dan pengurangan.

Cara menggunakan media pembelajaran ini sebagai berikut:

1. Peserta didik kelas 4 SD membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang

2. Buat kesepakatan bersama peserta didik terlebih dahulu bahwa warna merah merupakan negatif (-) dan warna hijau merupakan positif (+)
3. Setiap bola yang dimasukkan dalam tabung dan papannya warna hijau maka termasuk bilangan bulat positif contoh $5 = \text{lima}$, jika bola yang dimasukkan dalam tabung dan papannya warna merah maka bilangan bulat negatif contoh $-5 = \text{negatif lima}$
4. Jika bola dimasukkan ke dalam tabung dan papannya warna hijau sebanyak 7 dan bola dimasukkan ke dalam tabung dan papannya warna merah sebanyak 5 maka $7 + (-5) = 2$

Karena hanya satu media, media diletakkan di depan kelas dan guru memberi kesempatan siswa untuk mencoba menjawab soal dengan menggunakan media tersebut, dengan aturan main sebagai berikut:

1. Bagi siswa yang berani maju dan menjawab dengan benar akan mendapat hadiah. Hal ini dapat menyemangati siswa untuk angkat tangan ingin mencoba
2. Soal dibuat oleh siswa. Jika siswa yang maju ke depan dapat menjawab soal dengan benar maka dia akan mendapat hadiah. Namun jika salah menjawab, maka hadiah akan diberikan kepada siswa yang membuat soal dengan tambahan tugas membantu guru menjelaskan kepada teman-temannya

Kreativitas guru sangatlah penting untuk menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Media pembelajaran seperti ini sangatlah mudah untuk dibuat, namun tidak banyak guru yang bisa memiliki ide-ide untuk membuat media pembelajaran.

Media ini perlu dipraktikkan 2-3 kali agar siswa paham dan mudah menggunakannya. Kapasitas media ini hanya sampai 10 bola. Diharapkan setelah siswa memahami konsepnya, siswa tetap bisa menghitung bilangan lebih dari itu.

PELESTARIAN TINGGALAN BUDAYA BAWAH AIR: PEMAFAATAN KAPAL KARAM SEBAGAI DAYA TARIK WISATA SELAM

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari wilayahnya adalah laut. Salah satu misi Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia akan lebih fokus pada pemikiran strategis maritim Indonesia dengan mengimplementasikan konsep *Global Maritime Fulcrum* (Poros Maritim Dunia). Kunci keberhasilan untuk mewujudkannya telah tertuang dalam dua pilar penting dari konsep lima pilar, yaitu membangun kembali budaya maritim dan mengelola sumber daya kelautan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis bahari dilakukan dengan sinergi antara memperkuat budaya bahari dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Permasalahannya di satu sisi bahwa kondisi ekosistem terumbu karang sebagai atraksi selam semakin memburuk akibat ulah manusia.



Untuk membaca artikel penuh,
pindai gambar di atas ini.

PETUAH-PETUAH LELUHUR DALAM WÉRÉKKADA: SALAH SATU PENCERMINAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUGIS

Wérékkada adalah salah satu bentuk sastra klasik Bugis yang hingga kini masih dihayati oleh masyarakat berlatar belakang bahasa dan budaya Bugis yang berfungsi sebagai alat perekat hubungan antar individu dan sumber hukum serta peraturan yang mampu mengetuk hati, pikiran dan memerintahkan orang untuk berlaku jujur, berperilaku sopan santun, tahu adat istiadat, dan tata krama dalam hidup bermasyarakat. Tulisan ini menggambarkan kearifan lokal budaya Bugis yang hingga kini masih berlaku di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan dua teori yaitu, pendekatan pragmatik dan sosiologi sastra. Metode dan teknik yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif, yaitu memaparkan sebagaimana adanya.



Untuk membaca artikel penuh,
pindai gambar di atas ini.

SITUS KAMPUNG TUA KAO: IDENTITAS ASAL USUL DAN JEJAK PERADABAN ISLAM DI WILAYAH PEDALAMAN HALMAHERA UTARA

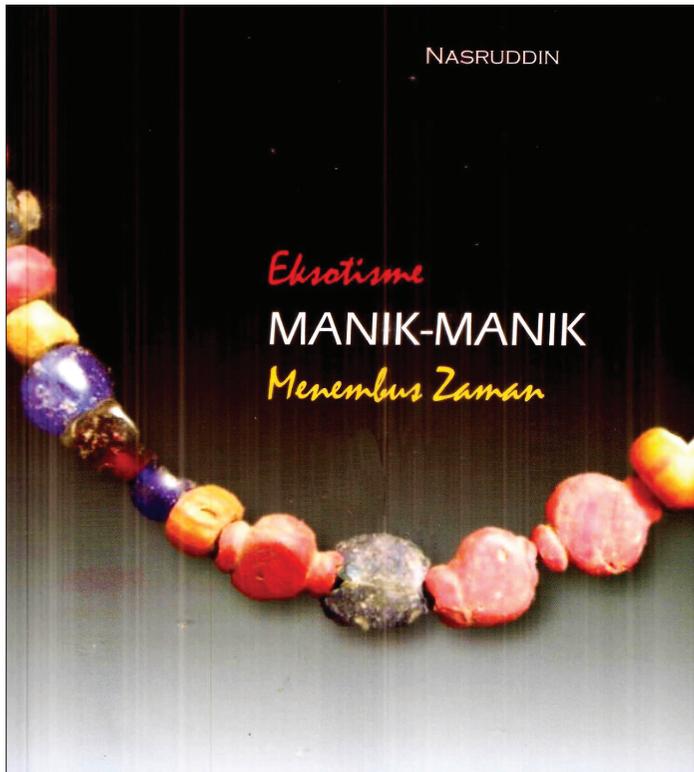
Hubungan Tanah Kao dengan kekuasaan Islam Ternate di Halmahera Utara tidak banyak disebutkan dalam berbagai literatur. Sebagian besar literatur menyebut tentang Tobelo dalam kaitannya dengan sejarah Hibualamo dan Kerajaan Moro. Namun, berdasarkan tradisi tutur masyarakat menyebutkan bahwa identitas asal-usul komunitas orang Halmahera Utara berasal dari Telaga Lina di Tanah Kao. Atas dasar tradisi tutur itulah yang menjadi dasar penelitian di Situs Kampung Tua Kao. Penelitian ini mengungkap penelusuran identitas komunitas yang mendiami situs Kampung Tua Kao pada masa lalu dan jejak-jejak peradaban Islam di situs Kampung Tua Kao dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan, survei lapangan, dan ekskavasi arkeologi.



Untuk membaca artikel penuh,
pindai gambar di atas ini.

MANIK-MANIK MEMESONA DARI DULU HINGGA SEKARANG

Penulis: Libra Hari Inagurasi



JUDUL BUKU :

EKSOTISME MANIK-MANIK MENEMBUS ZAMAN

ISBN :

978-979-8041-80-0

PENULIS:

NASRUDDIN

PENERBIT:

PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL

TAHUN TERBIT: 2017

CETAKAN:

PERTAMA

TEBAL BUKU:

107 HALAMAN

DIMENSI BUKU:

20,5 CM X 19 CM X 0,8 CM

BUKU DAPAT DIPEROLEH DI:

PUSAT PENELITIAN ARKEOLOGI NASIONAL

Buku ini ditulis oleh Nasruddin, seorang arkeolog Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) dan pemerhati tinggalan budaya manik-manik. Isi buku membahas tentang Perjalanan Manik-Manik sebagai jenis perhiasan menembus ruang dan lorong waktu. Dalam garis besarnya penulis mengulas manik-manik dari masa prasejarah dalam penelitian arkeologi hingga masa kekinian.

Ulasan buku tersebut diawali dengan manik-manik dalam penelitian arkeologi. Keberadaan manik-manik di Indonesia telah dikenal sejak ribuan tahun silam pada masa prasejarah. Manik-manik yang ditemukan ketika penelitian arkeologi berada di situs-situs arkeologi prasejarah misalnya: di Gua Sampung Ponorogo, Bojonegoro, Besuki, Bondowoso, Madiun, Plawangan Rembang, Gilimanuk Bali, Sambas Kalimantan Barat, dan Pasir Angin Bogor. Manik-manik masa prasejarah tersebut dalam konteks dengan temuan arkeologi lainnya seperti rangka manusia, peti kubur batu, tempayan, nekara. Fungsi manik-manik sebagai bekal kubur.

Memasuki masa berikunya, manik-manik berbahan kaca dan batu ditemukan pada situs-situs Hindu-Buddha masa Sriwijaya di Situs Karanganyar dan

Kambangkulan di Palembang, Situs Muara Jambi di Jambi, Situs Batujaya di Karawang. Bahan baku manik-manik adalah kaca, batu, dan kerang. Situs Karanganyar dan Kambangkulan di Palembang diduga sebagai pusat pembuatan manik-manik masa Sriwijaya.

Suku Dayak (Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan) di Kalimantan dan Orang Sumba di Nusa Tenggara Timur, merupakan contoh masyarakat tradisional di Indonesia masa sekarang yang masih menggunakan manik-manik untuk berbagai keperluan. Mereka menggunakannya selain sebagai asesoris juga untuk keperluan lain misalnya: benda bekal kubur, tanda atau simbol pertunangan, mas kawin, simbol strata sosial, alat tukar (barter).

Penciptaan nilai keindahan, artistik pada manik-manik merupakan satu hal yang menarik minat tradisi penggunaan manik-manik. Sejak masa prasejarah terus berlanjut hingga masa kini, dengan berbagai ragam fungsinya.

Isi buku mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya meskipun bukan dari kalangan arkeologi, karena ditulis secara populer.

TANTANGAN DUNIA PENELITIAN DI INDONESIA

Penulis: Amaliah Fitriah

Harus diakui bahwa dunia penelitian kita saat ini masih jalan ditempat. Banyak faktor yang saling terkait yang menyebabkan belum optimalnya produktifitas dunia penelitian Indonesia. Setidaknya ada empat tantangan dan permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi mengatasi tantangan tersebut. Berikut beberapa tantangan dan permasalahan tersebut.

RENDAHNYA ANGGARAN PENELITIAN

Rendahnya alokasi anggaran penelitian merupakan permasalahan klasik yang senantiasa muncul dalam perdebatan tentang produktifitas penelitian di Indonesia. Saat ini hanya 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang dialokasikan untuk keseluruhan anggaran penelitian. Jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, misalnya Malaysia yang menganggarkan 1,3 persen dan Singapura 2,36 persen dari PDB mereka. Negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia Timur bahkan mengalokasikan anggaran riset di atas 2 persen dari PDB mereka. Amerika mengalokasikan 2,7 persen, Jerman 2,85 persen, Jepang 3,4 persen, dan Taiwan 2,35 persen (Anggaran Riset Indonesia Paling Buntut di ASEAN, <http://risbang.ristekdikti.go.id/admin/media/Poskota-20160915-1.pdf>). Padahal, *United Nations Educational, Scientific and Cultural organization* (UNESCO) merekomendasikan bahwa rasio anggaran yang memadai untuk penelitian di suatu negara adalah setidaknya 2 persen dari PDB negara tersebut (<http://lipi.go.id/lipimedia/pertahankan-anggaran-riset/16014>).

Pada ranah perguruan tinggi negeri (PTN), sistem penganggaran PTN yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lantas menjamin anggaran penelitian PTN menjadi tercukupi. Rata-rata anggaran penelitian di PTN "hanya" dialokasikan dengan jumlah masih di bawah Rp 10 miliar per tahun bagi setiap PTN, dan kondisi lebih memprihatinkan terjadi di perguruan tinggi swasta (Hendra Gunawan, Kinerja Riset Perguruan Tinggi Kita). Belum lagi lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam penelitian dan pengembangan layaknya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Atom Nasional, dan sebagainya (*Asvi Warman Adam*, <http://lipi.go.id/lipimedia/menggugat-anggaran-riset/12341>).

Berdasarkan data Kemenristekdikti, anggaran indikatif di LIPI pada 2017 adalah sebesar Rp 1,1662 triliun, dan mengalami penurunan dari alokasi sebelumnya pada 2016 sebesar Rp 1,1783 triliun. Hal yang sama terjadi pada BPPT yang juga mengalami penurunan anggaran indikatif

tahun 2017 menjadi sebesar Rp 949,1 miliar dari sebelumnya pada 2016 adalah sebesar Rp 977,1 miliar (<http://lipi.go.id/lipimedia/pertahankan-anggaran-riset/16014>).

Kemudian, alokasi anggaran penelitian dalam anggaran Kemendikbud untuk tahun 2017 juga mengalami efisiensi dari 1,099.4 milyar menjadi 1,022.5 milyar dari total anggaran 37,964.1 milyar atau sekitar 2.7 persen dari total anggaran. Fungsi penelitian di Kemendikbud tidak hanya dilakukan untuk penelitian semata, akan tetapi juga meliputi pengembangan kurikulum dan perbukuan, pelaksanaan Ujian Nasional, pelaksanaan akreditasi PAUD, akreditasi sekolah dasar dan menengah, dan dukungan manajemen lainnya. Kebijakan penganggaran ini menunjukkan masih rendahnya perhatian terhadap penelitian, dan belum menempatkan penelitian sebagai unsur penting dalam pembangunan pendidikan dan peradaban manusia Indonesia.

KUALITAS PENELITI DAN MEKANISME REKRUTMEN PENELITI

Kualitas peneliti juga ikut turut menyumbang terhadap rendahnya produktivitas dan kualitas penelitian Indonesia. Sebagian besar peneliti di lembaga penelitian dan perguruan tinggi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sistem pengangkatan jabatan peneliti dilakukan sesuai dengan skema penerimaan PNS. Sistem ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah kualifikasi calon peneliti yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria peneliti yang dibutuhkan organisasi. Pola rekrutmen PNS yang dilakukan secara umum juga menyebabkan sektor penelitian tidak seluruhnya diisi oleh orang-orang yang tertarik dalam bidang penelitian. Aturan mengenai kenaikan pangkat peneliti juga dinilai terlalu membebani secara administratif, sehingga peneliti tidak dapat sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kajian penelitiannya. Beragam syarat administratif yang memberatkan tersebut menyebabkan waktu yang dimiliki peneliti banyak tersita.

Belum adanya sistem *rewards and punishment* yang jelas juga belum merangsang peneliti untuk tetap produktif dalam menghasilkan dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Sebagai contoh, sistem kepangkatan bagi PNS dan dosen tidak mengatur sanksi yang diberikan bagi para peneliti yang kurang produktif dan tidak menghasilkan karya. Kondisi ini melanggengkan sikap segelintir peneliti yang terlena dengan tidak adanya aturan pembebasan sementara dan pemberhentian peneliti dari jabatannya oleh karena kekurangan atau bahkan tidak mengumpulkan angka kredit.

RENDAHNYA JUMLAH PUBLIKASI ILMIAH DAN MINIMNYA BUDAYA PENELITIAN

Jumlah publikasi ilmiah menjadi ukuran tingkat produktifitas penelitian sebuah negara. Data Kemenristekdikti tentang publikasi Indonesia di jurnal internasional menunjukkan kondisi publikasi ilmiah Indonesia yang masih memprihatinkan (Kemenristekdikti, Kekuatan 50 Institusi Ilmiah Indonesia: Profil Publikasi Ilmiah Terindeks Scopus, 2016)

Data yang diolah dari Scopus menunjukkan jumlah publikasi Indonesia yang sudah terindeks Scopus periode tahun 2010 sampai April 2016 berjumlah 29.624 artikel. Angka ini menunjukkan trend yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2010-2016), namun masih berada di bawah Malaysia dan Thailand, dan sedikit berada di atas Filipina. Seperti data Scopus, publikasi internasional Indonesia yang terindeks *Web of Science* (Thomson) periode 2010-April 2016 juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand, yaitu berjumlah 17.636 artikel. Ketimpangan jumlah publikasi ilmiah internasional antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand periode 2010-2016 menunjukkan bahwa peneliti di Malaysia dan Thailand jauh lebih produktif dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional dibandingkan dengan peneliti di Indonesia.

Banyak hal yang dapat menjelaskan mengapa produktifitas publikasi ilmiah kita masih rendah dibanding negara lain. Selain anggaran dan kualitas peneliti seperti yang dijelaskan di atas, belum terbangunnya budaya penelitian dan komunitas ilmiah juga turut menyumbang bagi rendahnya produktifitas penelitian Indonesia. Forum-forum ilmiah berskala internasional masih sangat jarang diadakan, dan kalau pun ada belum secara efektif menstimulus para peneliti untuk tampil memaparkan hasil kajiannya di depan khalayak. Banyak dana penelitian yang dihibahkan oleh lembaga internasional untuk Indonesia, namun sayangnya tidak lantas menempatkan peneliti lokal menjadi *team leader* atau *research advisor* oleh karena kemampuan peneliti Indonesia masih diragukan secara internasional.

Khususnya bagi lembaga penelitian pemerintah, struktur anggaran dan pencapaian kinerja peneliti yang ada saat ini belum mendorong peneliti untuk produktif menulis pada jurnal-jurnal terakreditasi. Struktur anggaran negara memang memberikan insentif untuk peneliti yang akan melakukan studi lapangan untuk menggali data dan penulisan laporan penelitian, namun tidak dibarengi dengan penyediaan penghargaan bagi peneliti yang menerbitkan karya ilmiah terpublikasi dan diakui secara luas. Pun sama halnya dengan sistem penilaian pencapaian kinerja peneliti yang dinilai kurang mendorong animo peneliti untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan tidak hanya sekadar pemenuhan angka kredit dan kewajiban penulisan laporan hasil penelitian belaka.

Meskipun angka kredit untuk publikasi ilmiah internasional cukup besar, namun menulis laporan penelitian sudah cukup memberikan kredit untuk peneliti. Terlebih, untuk menembus publikasi internasional cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama. Akibatnya, peneliti cukup puas dengan menghasilkan sebuah laporan penelitian yang hanya berakhir di lemari-lemari penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Walhasil, penelitian yang dilakukan tidak berdampak pada perbaikan kualitas hidup orang banyak karena hasil penelitian tersebut tidak tersebar dan diakses oleh orang banyak.

Padahal, untuk membangun budaya penelitian di perguruan tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 152 Tahun 2012, yang mensyaratkan setiap sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) untuk mempublikasikan tugas akhirnya di jurnal nasional dan internasional terakreditasi sebagai syarat kelulusan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit juga memasukkan komponen publikasi ilmiah pada jurnal internasional sebagai salah satu persyaratan kenaikan jenjang jabatan dalam fungsional dosen (Kemenristekdikti, Kekuatan 50 Institusi Ilmiah Indonesia: Profil Publikasi Ilmiah Terindeks Scopus, 2016).

KOLABORASI DENGAN DUNIA INDUSTRI

Tantangan lain dunia penelitian Indonesia adalah rendahnya tingkat keterpakaian hasil-hasil penelitian oleh dunia industri, dikarenakan masih belum berupa hasil yang dapat langsung dimanfaatkan dan dirasakan kegunaannya. Sifat industri yang berorientasi pada keuntungan menyebabkan keengganan dunia industri untuk berinvestasi dan menggandeng penelitian dalam bidang produksinya. Oleh karena pentingnya relevansi penelitian kita dan dunia industri, maka perlu pengembangan penelitian yang bersikap aplikatif dengan kegunaan yang dapat langsung digunakan dalam dunia industri, tanpa mengesampingkan penelitian ilmu murni.

Lembaga penelitian juga perlu meningkatkan kemampuan kehumasan agar dapat mengomunikasikan dan menginformasikan hasil-hasil penelitiannya kepada masyarakat dan industri. Tak kalah penting adalah kemampuan personel lembaga penelitian untuk memasarkan jasa konsultasi penelitiannya sehingga dapat sinergis dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Beberapa isu terkait dunia penelitian Indonesia di atas hendaknya tidak dilihat semata sebagai sebuah permasalahan tanpa penyelesaian, namun seyogyanya dilihat sebagai sebuah tantangan yang memicu pada perbaikan-perbaikan penelitian Indonesia ke depan.

SETENGAH DARI PERSOALAN LITERASI KITA TERLETAK DI SEKOLAH

Oleh: Lukman Solihin

Suatu siang di SDN Bubutan IV, Kota Surabaya, pada pertengahan November 2015. Para siswa yang mendapat jatah kunjungan wajib ke perpustakaan sekolah sedang ramai memilih buku. Mereka kemudian duduk lesehan atau membaca sambil tiduran. Perpustakaan sekolah ini sengaja menyingkirkan bangku-bangku, diganti dengan karpet nyaman yang di tengahnya disediakan beberapa meja bundar pendek untuk alas buku ketika dibaca.

Tak lama, datang Husnul Hatimah, saat itu duduk di kelas 5. Pembawaannya ceria dan banyak senyum. Dia memakai mahkota dari kertas, juga selempang kain bertuliskan Duta Literasi SDN Bubutan IV. Untuk meningkatkan minat baca siswa, sekolah ini menempuh banyak cara, antara lain menyediakan perpustakaan yang nyaman dengan buku-buku yang memadai, membuat sudut baca di kelas, memiliki rapor membaca siswa, menyelenggarakan pemilihan duta literasi, serta memberi penghargaan bagi peminjam buku terbanyak yang diumumkan setiap upacara bendera di tiap bulannya.

Dari salah satu SD terbaik di Kota Surabaya ini, mari berkunjung ke sekolah lain, letaknya sekira satu jam perjalanan ke arah barat, di kabupaten tempat Kerajaan Majapahit pernah megah berdiri: Mojokerto. Di sini, ada SDN Mojokarang. Sekolah ini juga telah menerapkan budaya baca. Setiap pagi, biasanya siswa-siswi duduk berjejer rapi di muka kelas.

Pagi itu, sebelum pelajaran dimulai, siswa-siswi memegang beragam buku bacaan: cerita rakyat, dongeng-dongeng dunia, ensiklopedia mini, juga cerita-cerita terjemahan yang mengandung nilai-nilai etika. Mereka khidmat dalam laku membaca senyap. Pemandangan ini terselenggara berkat program dan pendampingan dari USAID Prioritas, lembaga donor dari Amerika Serikat yang memiliki perhatian terhadap upaya penumbuhan budaya baca di sekolah-sekolah mitra.

Dua sekolah di atas boleh dikata mujur. Pada kasus pertama, Pemerintah Kota Surabaya memiliki perhatian khusus terhadap upaya penumbuhan budaya baca, mulai dari standardisasi perpustakaan sekolah, sirkulasi dan penambahan koleksi buku, pengembangan kurikulum wajib baca, sampai menggaji tenaga honor profesional untuk menjadi pustakawan di sekolah-sekolah. Sedangkan pada kasus kedua, terdapat lembaga donor yang memilih sekolah tersebut sebagai mitra, sehingga beroleh bantuan buku dan pendampingan guna menghidupkan kegiatan literasi di sekolah.

Namun, sebagaimana akan tampak dari data statistik pendidikan, terdapat ribuan sekolah lain yang tidak memiliki perpustakaan. Jangankan menjalankan anjuran Permendikbud Nomor 23/2015 dengan melaksanakan program 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, bahan bacaan saja mereka tak punya.

Hasil pemantauan pelaksanaan GLS sepanjang tahun 2016 mencatat sebanyak 5.360 sekolah (lintas jenjang pendidikan) telah melakukan peningkatan kapasitas dan menjalankan kegiatan 15 menit membaca. Angka tersebut di luar sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program literasi sebelum GLS diluncurkan pada 2016 (Kilasan Kinerja 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Namun tantangan GLS masih cukup besar. Pertama, kuantitas sekolah yang telah melaksanakan GLS di atas baru sekitar 2 persen dari seluruh sekolah lintas jenjang (SD-SMA) yang berjumlah 218.326. Artinya, GLS masih memiliki tantangan berat untuk meluaskan praktik baiknya di lebih banyak sekolah. Kedua, sekolah-sekolah yang telah melaksanakan GLS bisa jadi mandek apabila tidak didukung ketersediaan bacaan dan SDM pengelola perpustakaan guna mendukung GLS sebagai program berkelanjutan. Ketiadaan pasokan bacaan baru dapat membuat siswa tidak lagi tertarik membaca karena merasa bosan.

SEJUMLAH MASALAH

Sastrawan Taufiq Ismail pernah mengungkapkan keprihatinannya perihal generasi nol buku, yakni para siswa yang dididik di sekolah tanpa kewajiban menghatamkan buku. Dalam makalah "Dari Pasar Djohar ke Djalan Kedjaksanaan" (2009), Taufiq Ismail memaparkan, siswa dari 13 negara yang ditelitinya membaca antara 7 sampai 32 buku selama masa studi mereka (antara 3-4 tahun). Bandingkan dengan siswa di Indonesia yang menurutnya tak memiliki kewajiban membaca buku alias nol buku. Inilah tragedi yang melahirkan "generasi rabun membaca dan pincang menulis".

Relevankah pembacaan Taufiq Ismail itu untuk kondisi saat ini? Data yang diajukan mungkin usang, tetapi persoalan besarnya masih sama, yaitu kurikulum wajib baca dan infrastruktur penopangnya yang terdiri dari perpustakaan dan tenaga pustakawan.

Di *level* kurikulum, kurikulum 2013 sebetulnya membuka kesempatan luas agar siswa lebih aktif membaca dan mendalami tema melalui

pembelajaran tematik-integratif. Sayangnya, dalam proses pembelajaran, acap kali guru terpaksa kepada buku teks pelajaran dan LKS (Lembar Kerja Siswa), sehingga proses pengayaan melalui buku-buku di perpustakaan jarang dilakukan. Proses pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, misalnya, tidak diarahkan untuk mendorong siswa aktif membaca buku-buku sastra.

Soal lain yang lebih gawat adalah minimnya sarana perpustakaan. Padahal, kedudukannya penting sebagai penyokong proses pembelajaran dan arsenal bagi upaya mendorong budaya baca siswa. Data awalnya cukup menggembirakan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah, maka di tingkat SD terdapat 61,45% perpustakaan, SMP 76,25%, SMA 76,40%, dan SMK 60,34%. Namun angka ini masih menyusut karena terdapat sejumlah perpustakaan dalam kondisi rusak ringan sampai rusak total. Alhasil, hanya tersisa 28.137 perpustakaan SD (19%), 8.315 Perpustakaan SMP (22%), 4.357 Perpustakaan SMA (33%), dan 3.566 Perpustakaan SMK (27%) dalam kondisi baik, selebihnya rusak ringan sampai rusak total (Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017).

Kedudukan perpustakaan sekolah tidak main-main, karena di tingkat SD saja keberadaannya melayani sekitar 25,6 juta siswa, di tingkat SMP melayani 10 juta siswa, SMA 4,6 juta siswa, dan SMK 4,6 juta siswa. Itulah mengapa, persoalan literasi kita setengahnya terletak di sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa pembenahan program literasi di sekolah secara agregatif dapat meningkatkan literasi bangsa Indonesia.

Terkait dengan sarana perpustakaan, masalah lain yang kerap timbul adalah minim dan kurang beragamnya jumlah koleksi, karena penambahan buku terkendala oleh anggaran, jauhnya akses ke toko buku, serta mahalnya biaya pengiriman buku jika pembelian dilakukan melalui toko buku daring. Sebagian perpustakaan sekolah hanya memiliki koleksi buku bantuan pemerintah terbitan Balai Pustaka tanpa penambahan yang berarti. Akibatnya mudah ditebak, siswa cepat bosan karena buku yang dibaca itu-itu saja.

Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan minimal 20% dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk pengembangan perpustakaan (Permendikbud No. 26 Tahun 2017). Sayangnya, dana itu umumnya habis untuk memenuhi kebutuhan buku teks pelajaran. Sebagian sekolah berinovasi dengan cara mengirimkan proposal ke penerbit buku, atau menggalang donasi buku melalui organisasi orang tua siswa. Hanya saja, cara ini jamaknya efektif di kota-kota, sementara di desa, di mana orang tua siswa memiliki penghasilan terbatas, serta akses ke toko buku atau penerbit relatif

jauh, membuat upaya donasi buku terganjal.

Selain sarana perpustakaan, masalah lain adalah SDM pengelola perpustakaan. Sampai saat ini, perpustakaan sekolah, terutama di tingkat SD, tidak dikelola oleh pustakawan PNS, karena tidak adanya penerimaan CPNS untuk formasi pustakawan. Akibatnya, banyak sekolah yang menggaji tenaga honor ala kadarnya, atau menggilir pengelolaan perpustakaan kepada guru-guru. Tiadanya SDM andal ini memengaruhi pengelolaan koleksi dan upaya penumbuhan budaya baca di sekolah. Banyak sekolah yang memfungsikan ruang perpustakaan sebagai gudang atau tempat bermain tenis meja karena tiadanya pengelola yang baik.

PRAKTIK BAIK DARI SURABAYA

Kota Surabaya mungkin satu-satunya pemerintah daerah yang berhasil mengintegrasikan kebijakan kurikulum wajib baca, pemenuhan sarana perpustakaan yang baik, dan perekrutan tenaga perpustakaan yang profesional. Sejak tahun 2014, Kota Surabaya telah mencanangkan diri sebagai Kota Literasi.

Di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini, Kota Surabaya menempuh beberapa strategi. Pertama, menerbitkan dasar hukum bagi program literasi, sehingga menjadi payung bagi program kerja di tingkat Dinas Pendidikan dan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah (Barpus). Kedua, merekrut tenaga pengelola perpustakaan yang dilatih, didampingi, dan diawasi oleh Barpus. Ketiga, membangun dan menstandarisasi perpustakaan sekolah. Keempat, membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta dan kampus melalui program *Corporate Social Responsibility dan Campus Social Responsibility* dengan membantu perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat (TBM). Kelima, rutin menyelenggarakan lomba literasi mulai dari tingkat sekolah, hingga tingkat kota, dengan hasil berupa terbitan buku yang dapat membanggakan para pesertanya.

Keberhasilan Kota Surabaya memperlihatkan bahwa program literasi yang diinisiasi dengan baik dapat berdampak nyata terhadap siswa. Sekolah-sekolah di Surabaya, seperti SDN Bubutan IV sebagaimana diceritakan di awal tulisan, umumnya memiliki sarana perpustakaan yang memadai dengan program-program literasi yang baik.

Banyak kabupaten dan kota lain berupaya menyelenggarakan program literasi, namun acap kali lupa menggarap dua unsur penting di dalamnya, yakni sarana perpustakaan dan SDM pengelolanya. Tanpa dua hal itu, hampir mustahil siswa kita akan memiliki budaya baca.

PELAKSANAAN UN DAN USBN 2018



GEBYAR HARDIKNAS 2018



Sumber Foto: BSNP, Sekretariat-Balitbang

DISKUSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA



KEGIATAN PISA



MTS Negeri 6 Bantul



SMP Terbuka Wawotobi, Kab. Konawe



SMA Negeri @ Unahaa, Kab. Konawe

Sumber Foto: Sekretariat Balitbang, Puspendik-Balitbang



**TINJAU UJIAN NASIONAL,
MENDIKBUD IKUTI ATURAN
TIDAK MASUK RUANG UJIAN**



**UJIAN NASIONAL SIAP
DIGELAR 8,1 JUTA PESERTA
DENGAN 78 PERSEN
BERBASIS KOMPUTER**



**KETUA BAN S/M: TARGET
KINERJA UTAMA UNTUK
MEMPERCEPAT
PENUNTASAN AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH**

Cari Hasil Studi dan Penelitian



**TEMUKAN ARTIKEL ILMIAH DAN VIDEO PRAKTIK
BAIK MELALUI LAMAN
[HTTP://LITBANG.KEMDIKBUD.GO.ID](http://litbang.kemdikbud.go.id)**





KERJA KITA
PRESTASI BANGSA

DIRGAHAYU INDONESIA



ASIAN GAMES
2018 | Jakarta
Palembang